



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKAYANG



TAHUN ANGGARAN 2024



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

I. PENDAHULUAN

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;



4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.1 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);



2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang



(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah



(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);



18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 16);
21. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 50 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Berbasis Akrua (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 50);
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024;
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024;
24. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Tengah



Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;

25. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2024;
26. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2024.

1.2 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

- 2.1. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas.
- 2.2. Sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya.



- 2.3. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional.

III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 3.2. Kebijakan Keuangan
- 3.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian Target

IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Transisi Laporan Keuangan dari Basis Kas Modifikasian ke Basis AkruaL.
- 4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.

V Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1 Pendapatan - LRA



- 5.1.2 Belanja
- 5.1.3 Pembiayaan
- 5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 5.3 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
 - 5.2.1 Pendapatan - LO
 - 5.2.2 Beban
 - 5.2.3 Kegiatan Non Operasional
 - 5.2.4 Akun Luar Biasa
- 5.4 Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 5.5 Penjelasan Akun-Akun Neraca
 - 5.5.1 Aset
 - 5.5.2 Kewajiban
 - 5.5.3 Ekuitas
- 5.6 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
 - 5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris



VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

- 6.1 Penggantian Manajemen Selama tahun Berjalan
- 6.2 Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi manajemen baru
- 6.3 Komitmen dan kontinjensi
- 6.4 Penggabungan atau pemekaran entitas akuntansi pada tahun berjalan
- 6.5 Kejadian yang berdampak sosial
- 6.6 Pengungkapan Lainnya
 - 6.6.1 Domisili
 - 6.6.2 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional
 - 6.6.3 Struktur Organisasi

VII Penutup



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
SEKRETARIAT DPRD
LAPORAN NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	2024	2023
1	ASET	7.717.776.387,91	8.060.579.263,21
2	ASET LANCAR	0,00	0,00
3	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
4	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
7	Kas di BLUD	0,00	0,00
8	Kas Dana BOS	0,00	0,00
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
10	Kas Lainnya	0,00	0,00
11	Setara Kas	0,00	0,00
12	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
13	Piutang Pendapatan	0,00	0,00
14	Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
15	Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
16	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
17	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
18	Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00
19	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
20	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
21	Piutang Lainnya	0,00	0,00
22	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
23	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
24	Persediaan	0,00	0,00
25	INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
26	Investasi Non Permanen	0,00	0,00
27	Investasi kepada BUMN	0,00	0,00
28	Investasi pada BUMD	0,00	0,00
29	Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
30	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00

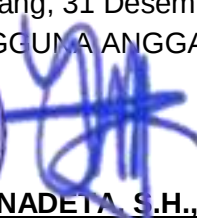


31	Dana Bergulir	0,00	0,00
32	Investasi Permanen	0,00	0,00
33	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
34	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
35	ASET TETAP	7.678.221.587,91	8.011.044.463,21
36	Tanah	311.025.000,00	311.025.000,00
37	Peralatan dan Mesin	7.952.021.321,00	7.375.871.321,00
38	Gedung dan Bangunan	8.766.321.010,00	8.766.321.010,00
39	Jalan, Irigasi , dan jaringan	263.510.600,00	263.510.600,00
40	Aset Tetap Lainnya	132.565.106,00	132.565.106,00
41	Kontruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
42	Akumulasi Penyusutan	(9.747.221.449,09)	(8.838.248.573,79)
43	DANA CADANGAN	0,00	0,00
44	Dana Cadangan	0,00	0,00
45	ASET LAINNYA	39.554.800,00	49.534.800,00
46	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00
47	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
48	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
49	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
50	Kemitraan Pihak Ketiga	0,00	0,00
51	Aset Tidak Berwujud	49.900.000,00	49.900.000,00
52	Aset Lain-lain	2.009.078.971,00	2.009.078.971,00
53	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(29.940.000,00)	(19.960.000,00)
54	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.989.484.171,00)	(1.989.484.171,00)
55	PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
56	Properti Investasi Tanah	0,00	0,00
57	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
58	Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi	0,00	0,00
59	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0,00	0,00
60	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7.717.776.387,91	8.060.579.263,21
61	KEWAJIBAN	8.426.801,00	8.426.801,00
62	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	8.426.801,00	8.426.801,00
63	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
64	Utang Bunga	0,00	0,00
65	Utang Pinjaman jangka Pendek	0,00	0,00
66	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
67	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
68	Utang Belanja	8.426.801,00	8.426.801,00
69	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00



70	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
71	Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
72	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
73	Utang kepada Masyarakat (Obligasi)	0,00	0,00
74	Premium(Diskonto) Obligasi	0,00	0,00
75	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
76	EKUITAS	7.709.349.586,91	8.052.152.462,21

Bengkayang, 31 Desember 2024
PENGGUNA ANGGARAN



BERNADETA S.H., M.H



II. INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

2.1. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas.

Sekretariat DPRD dibentuk Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 34 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

2.2. Sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya.

Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 34 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, adalah sebagai berikut :

a. Kedudukan

Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah secara teknis operasional dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



b. Tugas Pokok

Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan serta mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan.

c. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariat DPRD Kabupaten/Kota;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Kabupaten/Kota;
3. Penyelenggaraan Rapat – rapat DPRD Kabupaten/Kota; dan
4. Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten/Kota;

2.3. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 34 tahun 2022 tentang Struktur



Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah.

III. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

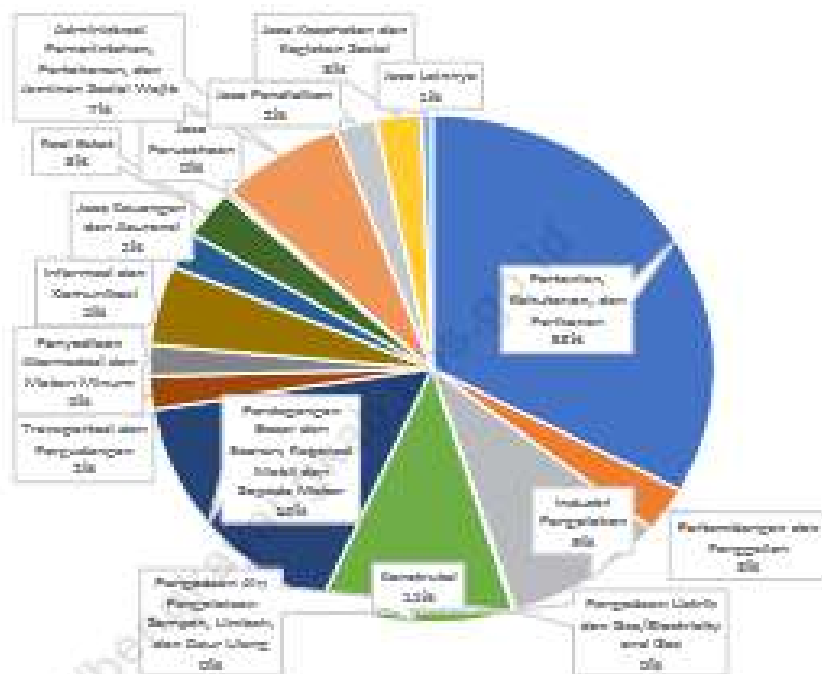
3.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu alat ukur keberhasilan kerja ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu Tengah atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 adalah sebesar 10.324,51 juta rupiah dan meningkat menjadi 11.146,26 juta rupiah pada tahun 2023. Selain itu, PDRB Kabupaten Bengkulu Tengah atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2022 adalah sebesar 6.161,45 juta rupiah juga mengalami kenaikan menjadi 6.449,88 juta rupiah pada tahun 2023.

Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010, perekonomian Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,68 persen setelah Pandemi Covid-19 yang mulai mereda, membuat aktivitas perekonomian menjadi bangkit kembali yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkulu Tengah.

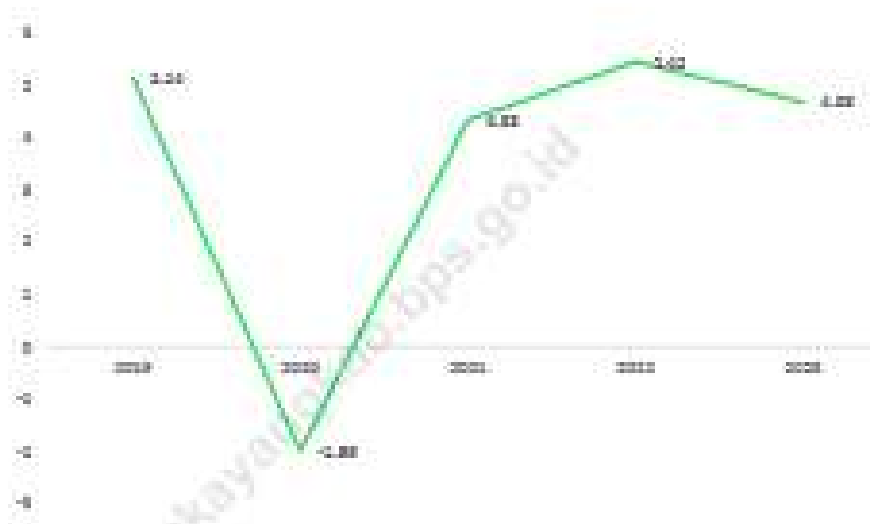


KABUPATEN BENGKULU TENGAH DALAM ANGKA 2024



Sumber/Source: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain, dikolah/BPS-Statistik Indonesia, written census, survey, and other sources, processed

Gambar 12.1
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bengkulu Tengah (%), 2023
Percentage Distribution of Gross Regional Domestic Product at Current Market Prices by Industry in Bengkulu Regency (%), 2023



Sumber/Source: BPS, berbagai sumber, survei dan sumber lain, data dari BPS, Statistik Indonesia, berbagai sumber, survey and other sources, processed

Gambar
Figures

12.2

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas
Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di
Kabupaten Bengkulu Tengah (%), 2019–2023
*Growth Rate of Gross Regional Domestic Product at 2010
Constant Market Prices by Industry in Bengkulu
Regency (%), 2019–2023*



Tabel 12.1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bengkulu Tengah (miliar rupiah), 2019-2023
Gross Regional Domestic Product at Current Market Prices by Industry in Bengkulu Tengah Regency (billion rupiahs), 2019-2023

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	2.840,98	2.916,99	3.137,05	3.456,45	3.677,92
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	200,54	262,85	280,20	307,87	326,46
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	874,64	854,34	942,96	1.042,70	1.052,19
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,92	0,97	1,00	1,07	1,23
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Cagar Budaya/Water Supply, Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	5,41	5,69	6,14	6,53	6,94
F	Konstruksi/Construction	926,97	891,85	1.003,33	1.174,94	1.236,80
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	1.341,85	1.307,85	1.371,66	1.572,26	1.779,57
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	174,90	168,11	170,42	200,12	238,40
I	Pengeduaan Akomodasi dan Makanan Minum/Accommodation and Food Service Activities	186,93	165,15	180,97	201,60	221,21
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	407,48	448,37	483,46	518,34	564,53



Lanjutan Tabel/Continued Table 12.1

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	236,07	219,25	232,71	245,56	257,59
I	Real Estate/Real Estate Activities	794,44	797,49	802,60	812,25	843,83
M,M	Jasa Persewaan/Business Activities	10,79	18,40	28,52	32,04	37,44
O	Administrasi Pemerintahan, Perbaikan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Ordinar, Compulsory Social Security	640,54	677,66	684,09	716,20	706,06
P	Jasa Pendidikan/Education	218,33	204,02	216,28	233,38	257,02
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	144,23	174,07	236,96	234,25	288,37
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	66,99	50,32	49,71	55,98	65,09
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		8.645,00	8.672,73	9.318,53	10.324,51	11.146,26

Catatan/Note: * Angka Sementara / Preliminary figures
 ** Angka Sangat Sementara / Key Preliminary figures
Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, berbagai sumber, survei dan sumber lain/BPS Statistics Indonesia, various census, survey, and
other sources



Tabel 12.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bengkayang (miliar rupiah), 2019–2023
Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant Market Prices by Industry in Bengkayang Regency (billion rupiahs), 2019–2023

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022 ^a	2023 ^{ab}
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	2.035,89	2.038,25	2.098,84	2.170,22	2.190,44
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	158,38	155,89	162,48	172,84	176,62
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	588,53	554,89	588,65	612,48	628,12
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,62	0,68	0,69	0,72	0,82
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply, Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	4,32	4,58	4,75	5,04	5,28
F	Konstruksi/Construction	505,53	474,82	511,88	548,88	580,15
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	948,52	884,83	914,19	1.001,89	1.085,43
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	108,83	82,94	96,85	118,96	118,24
I	Pengediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	112,22	83,84	101,38	118,28	118,22
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	322,82	348,54	368,98	386,52	431,55



Lanjutan Tabel/Continued Table 12.2

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	156,25	151,29	156,47	158,11	166,14
I	Retail Eksternal/ Retail Activities	182,28	181,63	188,66	192,10	210,96
M,N	Jasa Perumahan/Business Activities	18,44	17,35	17,39	18,81	21,43
O	Administrasi Pemerintahan, Perumahan, dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration and Defense, Compulsory Social Security	292,24	298,08	295,57	300,03	317,15
P	Jasa Pendidikan/ Education	148,28	138,24	145,60	152,63	162,08
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	100,89	115,83	148,45	148,49	178,30
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ Other Services Activities	46,89	17,75	18,33	41,93	47,65
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product		5.214,30	5.688,32	5.842,91	6.161,45	6.449,88

Catatan/Note: * Angka Sementara / Preliminary figures
** Angka Sangat Sementara / Very Preliminary figures
Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, berbagai sumber, survei dan sumber lain/ BPS Statistics Indonesia, various sources, survey, and other sources



Tabel 12.3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bengkulu Tengah, 2019–2023
Percentage Distribution of Gross Regional Domestic Product at Current Market Prices by Industry in Bengkulu Tengah Regency, 2019–2023

Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	32,96	33,63	33,66	33,42	33,0
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	1,01	1,01	1,01	2,98	2,9
C Industri Pengolahan/Manufacturing	10,12	9,85	10,12	10,10	9,4
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Suci Mang/Water Supply, Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,06	0,07	0,07	0,06	0,1
F Konstruksi/Construction	10,72	10,28	10,77	11,28	11,1
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	15,52	15,08	14,74	15,23	16
H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	2,02	1,94	1,83	2,02	2,1
I Pengediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	2,18	1,90	1,94	1,95	2
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	4,71	5,17	5,17	5,02	5,1
K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	2,61	2,53	2,58	2,38	2,3



Lanjutan Tabel/Continued Table 12.3

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Real Estate/Real Estate Activities	3,41	3,40	3,25	3,00	3,1
M,M	Jasa Perusahaan/Business Activities	0,16	0,33	0,31	0,31	0,1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Publik Administration and Defense, Compulsory Social Security	7,41	7,81	7,34	7,03	7,2
P	Jasa Pendidikan/Education	2,51	2,35	2,33	2,26	2,1
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Health and Social Work Activities	1,67	2,03	2,44	2,37	2,6
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	0,77	0,58	0,53	0,54	0,6
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		100	100	100	100	100

Catatan/Kete: * Angka Sementara / Preliminary figures

** Angka Sangat Sementara / Very Preliminary figures

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, berbagai survei, survei dan sumber lain/BPS Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources



Tabel 12.4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bengkayang (persen), 2019–2023
Growth Rate of Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant Market Prices by Industry in Bengkayang Regency (percent), 2019–2023

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(1)	(1)	(1)	(2)	(2)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	6,95	0,16	2,97	3,78	0,61
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	3,15	-2,52	4,77	5,88	2,69
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	6,52	-4,07	5,70	4,04	2,57
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	4,48	2,17	1,08	3,47	13,73
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply, Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	4,35	4,22	5,54	6,11	4,70
F	Konstruksi/Construction	1,03	-6,23	7,97	9,43	4,13
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparat Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	4,57	-5,71	3,31	9,35	8,34
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	4,67	-14,80	-1,01	14,45	7,01
I	Pengadaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	6,05	-14,38	7,74	9,08	8,60
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	5,95	8,21	6,15	7,17	8,04
K	Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	-0,63	-2,85	3,08	1,05	5,08



Lanjutan Tabel/Continued Table 12.4

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
L	Real Estate/Real Estate Activities	2,07	0,73	1,28	1,38	9,70
M,N	Usaha Persewaan/Business Activities	4,48	-5,93	0,26	8,15	13,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib-Publik Administration and Defense, Compulsory Social Security	5,51	1,00	-0,84	1,51	5,77
P	Usaha Pendidikan/Education	3,73	-6,11	4,58	4,82	9,47
Q	Usaha Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Health and Social Work Activities	5,22	15,72	20,56	0,70	19,27
R,S,T,U	Usaha Lainnya/Other Services Activities	5,84	-19,48	1,54	9,38	13,62
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		5,14	-3,99	4,33	5,45	4,68

Catatan/Note: * Angka Sementara / Preliminary figures
 ** Angka Sangat Sementara / Very Preliminary figures
Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, berbagai sumber, survei dan sumber lain/BPS- Statistics Indonesia, various sources, survey, and other sources



Tabel
Table 12.5

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Bengkayang (miliar rupiah), 2019–2023
Gross Regional Domestic Product at Current Market Prices by Type of Expenditure in Bengkayang Regency (billion rupiahs), 2019–2023

Jenis Pengeluaran Type of Expenditure	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Household Consumption Expenditure	5.051,35	5.405,37	5.329,72	5.846,02	6.168,32
Pengeluaran Konsumsi LRPB LRPB Consumption Expenditure	154,91	152,77	148,07	187,40	212,47
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Government Consumption Expenditure	1.205,73	1.166,15	1.231,25	1.268,81	1.430
Pembentukan Modal Tetap Bruto Gross Fixed Capital Formation	2.480,60	2.630,66	2.845,01	3.185,56	3.686,94
Perubahan Inventori Changes in Inventories	37,01	15,04	16,94	24,38	48,64
Net Ekspor Barang dan Jasa Net Exports of Goods and Services	-502,58	-332,27	-271,98	-179,76	-80,52
Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Product	8.445	8.673,73	9.318,53	10.334,51	11.346,36

Catatan/Note: * Angka Sementara / Preliminary figures

** Angka Sangat Sementara / Very Preliminary figures

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, berbagai sumber, survei dan sumber lain/SPS Statistics Indonesia, various sources, survey, and other sources



Tabel 12.6 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Bangkayang (miliar rupiah), 2019–2023
Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant Market Prices by Type of Expenditure in Bangkayang Regency (billion rupiahs), 2019–2023

Jenis Pengeluaran Type of Expenditure	2019	2020	2021	2022*	2023**
(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Household Consumption Expenditure	1.340,40	1.320,02	1.303,67	1.340,44	1.688,58
Pengeluaran Konsumsi LNPH LNPH Consumption Expenditure	106,66	104,36	106,47	113,40	121,3
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Government Consumption Expenditure	822,57	773,86	782,53	750,03	809,4
Pembentukan Modal Tetap Bruto Gross Fixed Capital Formation	1.387,01	1.572,57	1.651,04	1.774,41	1.934,52
Perubahan Inventori Changes in Inventories	42,20	37,37	33,24	56,23	63,22
Net Ekspor Barang dan Jasa Net Exports of Goods and Services	-194,61	-208,65	-116,02	-112,04	-756,54
Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Product	5.714,34	5.489,12	5.642,93	6.361,45	6.489,28

Catatan/Kata: * Angka Sementara / Preliminary figures
** Angka Sangat Sementara / Very Preliminary figures
Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, berbagai sumber, survei dan sumber lain/WPS-Statistik Indonesia, various sources, survey, and other sources.



Perkembangan PDRB Kabupaten Bengkulu Tengah

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB ADHK (Juta Rp)	5.714,30	5.600,32	5.842,93	6.161,45	6.449,88
PDRB ADHB (Juta Rp)	8.645.002,90	8.672.734,00	9.318.527,80	10.324.506,4	11.146.260,7
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,23	-1,99	4,33	5,45	4,68

Sumber : Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Angka 2024

3.2. Kebijakan Keuangan

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara efisien, efektif, transparan, adil, akuntabel dan berbasis kinerja untuk mendanai berbagai program dan kegiatan pembangunan. Pendekatan berbasis kinerja berarti bahwa penetapan anggaran suatu SKPD harus disertai sasaran dan indikator kinerja (masukan, keluaran dan hasil) yang spesifik, terukur, dapat dicapai, masuk akal dan memperhatikan dimensi waktu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; serta memperhatikan kondisi keuangan daerah. Sedangkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas berarti bahwa penetapan mekanisme pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan berbasis sistem informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan



sehingga pengelolaan dana bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah secara berkelanjutan.

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diubah dan dilengkapi dengan ketentuan baru yang diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan keuangan daerah, maka kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bengkayang selama periode tahun 2023 diarahkan pada hal-hal berikut:

- a. Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai langkah sebagai berikut:
 - 1) Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;



- 2) Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
- 3) Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;
- 4) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan;
- 5) Melakukan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah melalui razia di lapangan secara terus-menerus dan menggali sumber pajak baru dan penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan secara paksa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga diupayakan melalui peningkatan kendaraan bermotor asal luar daerah yang mutasi ke Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 6) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan gedung/asrama/aula yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari gedung/asrama/aula tersebut;
- 7) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BULD) dalam memberikan pelayanan publik dan



- meningkatkan pendapatan daerah termasuk meningkatkan bagian laba Bank Kalbar, BRI dan BNI dan laba atas penyertaan modal pada PT MBM; dan
- 8) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan berbagai pihak terkait lainnya dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pendapatan daerah.
- b. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari dana perimbangan terutama dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara lebih adil.
- 1) Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh SKPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
 - 2) Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
 - 3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan.
- c. Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam pengelolaan berbagai aset daerah;
- d. Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru dan yang sah.

Kebijakan tersebut di atas akan terus dilaksanakan sampai tahun 2026 dalam rangka implementasi kebijakan yang termaktub di dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 – 2026.



2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Struktur belanja daerah menggambarkan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung diarahkan untuk penyelenggaraan operasional pemerintahan mencakup pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan desa, serta belanja tidak terduga dan belanja langsung diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan khususnya mendukung terwujudnya visi, misi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melalui prioritas pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah mengutamakan pada pencapaian hasil program dan kegiatan melalui belanja langsung dengan arah sebagai berikut:

- a. Menjalankan kebijakan anggaran defisit sebagai upaya maksimalisasi pelayanan pada masyarakat yang pendanaannya dibebankan pada sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya



- b. Memberikan dukungan yang proporsional baik dari aspek perencanaan maupun pendanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas pembantuan dan pelaksanaan urusan dekonsentrasi di daerah, dalam bentuk pemberian dana pendampingan yang menjadi beban APBD
- c. Pencadangan kembali anggaran untuk belanja tidak langsung khusus belanja gaji PNS berdasarkan kondisi riil
- d. Melakukan pergeseran anggaran baik pada rincian objek, maupun kegiatan dan program berikut rincian pembiayaan.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh jumlah belanja daerah lebih besar dibanding pendapatan daerah yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan pembiayaan Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan pembiayaan mengacu pada hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan daerah khusus terkait dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Tahun anggaran 2023





- b. Semua sisa kas yang ada pada pemegang kas daerah sampai dengan 31 Desember 2023 diakui sebagai sisa lebih perhitungan (SILPA) tahun anggaran 2024
- c. Semua sisa UUDP yang ada pada pemegang kas atau unit kerja yang belum disetor pada kas daerah sampai 31 Desember diakui sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun bersangkutan.

3.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2024, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah mempunyai 2 (*dua*) program dalam urusan penyelenggaraan pelayanan fasilitasi kepada Anggota DPRD, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.

Program-program pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan
- b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.



RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

SEKRETARIAT DPRD KAB. BENGKAYANG

TAHUN 2024

No	Kode rekening					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
1	2					3
						SEKRETARIAT DPRD
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
	4	02				SEKRETARIAT DPRD
1	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	4					NON URUSAN
	4	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
	4	02				SEKRETARIAT DPRD
3	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD



	4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
	4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	4	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
	4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
	4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	4	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
	4	02	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
	4	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
	4	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi



	4	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	4	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material
	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	4	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	4	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	4	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel
	4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya



	4	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	4	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel
	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD



	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD
	4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
4	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
	4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan



	4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
	4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
	4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
	4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran
	4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD
	4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD



	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
	4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD
	4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD
	4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah
	4	02	02	2.07	0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah
	4	02	02	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
	4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
	4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD



3.4. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Realisasi Pendapatan – LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2024 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar **Rp 33.523.514,00** atau **98,13%** dari anggaran sebesar **Rp. 34.163.802.010,00** Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang selama tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Belanja





**LAPORAN REALISASI KEUANGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2024**
PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN SEBESAR

Rp 34,163,802,010.00

DENGAN RINCIAN BELANJA SEBAGAI BERIKUT :

1. PENDAPATAN

2. PENDAPATAN TRANSFER

3. BELANJA OPERASI TERDIRI DARI :

A. BELANJA PEGAWAI

B. BELANJA BARANG/JASA

C. BELANJA MODAL

Rp. 0,-

RP. 0,-

RP. 18.052.765.135

RP. 16.061.036.875

RP. 50.000.000

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan			
	- Pendapatan Asli daerah	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja			
	- Belanja Operasi	34.113.802.010,00	33.473.814.714,00	98,12
	- Belanja Modal	50.000.000,00	49.700.000,00	99,40%
	Jumlah Belanja	34.163.802.010,00	33.523.514.714,00	98,13

45



Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
SEKRETARIAT DPRD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN SEMESTER KEDUA TAHUN 2024
UNAUDITED

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/KURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus-Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.04	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.02	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.02	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00



Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2024



	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA	34.163.802.010,00	33.523.514.714,00	640.287.296,00	98,13
5.1	BELANJA OPERASI	34.113.802.010,00	33.473.814.714,00	639.987.296,00	98,12
5.1.01	Belanja Pegawai	18.052.765.135,00	17.673.897.293,00	378.867.842,00	97,90
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.061.036.875,00	15.799.917.421,00	261.119.454,00	98,37
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Operasi	34.113.802.010,00	33.473.814.714,00	639.987.296,00	98,12
5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.700.000,00	300.000,00	99,40
5.2.01	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	49.700.000,00	300.000,00	99,40
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Modal	50.000.000,00	49.700.000,00	300.000,00	99,40
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	34.163.802.010,00	33.523.514.714,00	640.287.296,00	98,13
	SURPLUS/DEFISIT	(34.163.802.010,00)	(33.523.514.714,00)	(640.287.296,00)	98,13
6	PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04.01	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04.02	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04.03	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04.04	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04.05	Pinjaman Dalam Negeri - Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.06	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00



6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03.02	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03.05	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(34.163.802.010,00)	(33.523.514.714,00)	(640.287.296,00)	98,13

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Belanja Daerah

Realisasi Fisik belanja sampai akhir tahun 2024 sebesar **Rp 33.523.514.714,00** atau **98,13%** yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG SKPD SEKRETARIAT DPRD TAHUN ANGGARAN 2024					
REALISASI FISIK PERIODE 31 DESEMBER 2024					
KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
4.02.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI	22.431.755.688,00	21.988.759.749,00	442.995.939,00	98,03
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.000.000,00	44.428.000,00	572.000,00	98,73
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00



Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2024



4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.01.0001.51	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.01.0001.5102	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.01.0001.510201	Belanja Barang	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.01.0001.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.01.0001.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.01.0001.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.01.0001.510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.01.0001.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.01.0002.51	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.01.0002.5102	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.01.0002.510201	Belanja Barang	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.01.0002.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.01.0002.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.01.0002.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.01.0002.510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.01.0002.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.500.000,00	7.345.000,00	155.000,00	97,93
4.02.01.2.01.0003.51	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.345.000,00	155.000,00	97,93
4.02.01.2.01.0003.5102	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.345.000,00	155.000,00	97,93
4.02.01.2.01.0003.510201	Belanja Barang	7.500.000,00	7.345.000,00	155.000,00	97,93
4.02.01.2.01.0003.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.500.000,00	7.345.000,00	155.000,00	97,93
4.02.01.2.01.0003.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.01.0003.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.230.000,00	2.075.000,00	155.000,00	93,05
4.02.01.2.01.0003.510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.01.0003.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.500.000,00	7.375.000,00	125.000,00	98,33
4.02.01.2.01.0004.51	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.375.000,00	125.000,00	98,33
4.02.01.2.01.0004.5102	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.375.000,00	125.000,00	98,33
4.02.01.2.01.0004.510201	Belanja Barang	7.500.000,00	7.375.000,00	125.000,00	98,33
4.02.01.2.01.0004.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.500.000,00	7.375.000,00	125.000,00	98,33
4.02.01.2.01.0004.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	7.375.000,00	125.000,00	98,33



Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2024



4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		7.333.000,00	167.000,00	97,77
4.02.01.2.01.0005.51	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.333.000,00	167.000,00	97,77
4.02.01.2.01.0005.5102	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.333.000,00	167.000,00	97,77
4.02.01.2.01.0005.510201	Belanja Barang	7.500.000,00	7.333.000,00	167.000,00	97,77
4.02.01.2.01.0005.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.500.000,00	7.333.000,00	167.000,00	97,77
4.02.01.2.01.0005.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.405.000,00	2.390.000,00	15.000,00	99,38
4.02.01.2.01.0005.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.200.000,00	2.048.000,00	152.000,00	93,09
4.02.01.2.01.0005.510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.01.0005.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.500.000,00	7.375.000,00	125.000,00	98,33
4.02.01.2.01.0006.51	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.375.000,00	125.000,00	98,33
4.02.01.2.01.0006.5102	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.375.000,00	125.000,00	98,33
4.02.01.2.01.0006.510201	Belanja Barang	7.500.000,00	7.375.000,00	125.000,00	98,33
4.02.01.2.01.0006.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.500.000,00	7.375.000,00	125.000,00	98,33
4.02.01.2.01.0006.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	7.375.000,00	125.000,00	98,33
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.121.578.874,00	2.892.745.764,00	228.833.110,00	92,67
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.076.578.874,00	2.847.745.764,00	228.833.110,00	92,56
4.02.01.2.02.0001.51	BELANJA OPERASI	3.076.578.874,00	2.847.745.764,00	228.833.110,00	92,56
4.02.01.2.02.0001.5101	Belanja Pegawai	3.076.578.874,00	2.847.745.764,00	228.833.110,00	92,56
4.02.01.2.02.0001.510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.182.030.072,00	2.085.485.680,00	96.544.392,00	95,58
4.02.01.2.02.0001.51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	1.548.015.000,00	1.525.232.526,00	22.782.474,00	98,53
4.02.01.2.02.0001.510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.548.015.000,00	1.525.232.526,00	22.782.474,00	98,53
4.02.01.2.02.0001.51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	158.090.000,00	155.689.172,00	2.400.828,00	98,48
4.02.01.2.02.0001.510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	158.090.000,00	155.689.172,00	2.400.828,00	98,48
4.02.01.2.02.0001.51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	110.407.000,00	109.890.000,00	517.000,00	99,53
4.02.01.2.02.0001.510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	110.407.000,00	109.890.000,00	517.000,00	99,53
4.02.01.2.02.0001.51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	42.090.000,00	38.982.000,00	3.108.000,00	92,62
4.02.01.2.02.0001.510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	42.090.000,00	38.982.000,00	3.108.000,00	92,62
4.02.01.2.02.0001.51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	48.770.000,00	48.510.000,00	260.000,00	99,47
4.02.01.2.02.0001.510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	48.770.000,00	48.510.000,00	260.000,00	99,47
4.02.01.2.02.0001.51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	90.719.000,00	89.800.800,00	918.200,00	98,99
4.02.01.2.02.0001.510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	90.719.000,00	89.800.800,00	918.200,00	98,99
4.02.01.2.02.0001.51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	58.201.196,00	16.826.996,00	41.374.200,00	28,91
4.02.01.2.02.0001.510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	58.201.196,00	16.826.996,00	41.374.200,00	28,91
4.02.01.2.02.0001.51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	33.000,00	21.245,00	11.755,00	64,38
4.02.01.2.02.0001.510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	33.000,00	21.245,00	11.755,00	64,38



4.02.01.2.02.0001.51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	111.929.000,00	87.997.343,00	23.931.657,00	78,62
4.02.01.2.02.0001.510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	111.929.000,00	87.997.343,00	23.931.657,00	78,62
4.02.01.2.02.0001.51010110	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.709.876,00	3.133.889,00	575.987,00	84,47
4.02.01.2.02.0001.510101100001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.709.876,00	3.133.889,00	575.987,00	84,47
4.02.01.2.02.0001.51010111	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	10.066.000,00	9.401.709,00	664.291,00	93,40
4.02.01.2.02.0001.510101110001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.066.000,00	9.401.709,00	664.291,00	93,40
4.02.01.2.02.0001.510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	894.548.802,00	762.260.084,00	132.288.718,00	85,21
4.02.01.2.02.0001.51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	658.820.226,00	534.379.384,00	124.440.842,00	81,11
4.02.01.2.02.0001.510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	658.820.226,00	534.379.384,00	124.440.842,00	81,11
4.02.01.2.02.0001.51010203	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	5.728.576,00	3.928.166,00	1.800.410,00	68,57
4.02.01.2.02.0001.510102030001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	5.728.576,00	3.928.166,00	1.800.410,00	68,57
4.02.01.2.02.0001.51010205	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	230.000.000,00	223.952.534,00	6.047.466,00	97,37
4.02.01.2.02.0001.510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	230.000.000,00	223.952.534,00	6.047.466,00	97,37
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.02.0003.51	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.02.0003.5102	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.02.0003.510201	Belanja Barang	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.02.0003.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.02.0003.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.02.0005.51	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.02.0005.5102	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.02.0005.510201	Belanja Barang	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.02.0005.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.02.0005.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.290.000,00	3.290.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.02.0005.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.230.000,00	5.230.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.02.0005.510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.02.0005.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.02.0006.51	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.02.0006.5102	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.02.0006.510201	Belanja Barang	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.02.0006.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.02.0006.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00



4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.02.0007.51	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.02.0007.5102	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.02.0007.510201	Belanja Barang	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.02.0007.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.02.0007.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.02.0007.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.02.0007.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.999.500,00	29.911.300,00	88.200,00	99,71
4.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.500.000,00	7.429.500,00	70.500,00	99,06
4.02.01.2.03.0001.51	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.429.500,00	70.500,00	99,06
4.02.01.2.03.0001.5102	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.429.500,00	70.500,00	99,06
4.02.01.2.03.0001.510201	Belanja Barang	7.500.000,00	7.429.500,00	70.500,00	99,06
4.02.01.2.03.0001.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.500.000,00	7.429.500,00	70.500,00	99,06
4.02.01.2.03.0001.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	7.429.500,00	70.500,00	99,06
4.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	7.500.000,00	7.487.300,00	12.700,00	99,83
4.02.01.2.03.0003.51	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.487.300,00	12.700,00	99,83
4.02.01.2.03.0003.5102	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.487.300,00	12.700,00	99,83
4.02.01.2.03.0003.510201	Belanja Barang	7.500.000,00	7.487.300,00	12.700,00	99,83
4.02.01.2.03.0003.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.500.000,00	7.487.300,00	12.700,00	99,83
4.02.01.2.03.0003.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	7.487.300,00	12.700,00	99,83
4.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.499.500,00	7.496.000,00	3.500,00	99,95
4.02.01.2.03.0005.51	BELANJA OPERASI	7.499.500,00	7.496.000,00	3.500,00	99,95
4.02.01.2.03.0005.5102	Belanja Barang dan Jasa	7.499.500,00	7.496.000,00	3.500,00	99,95
4.02.01.2.03.0005.510201	Belanja Barang	7.499.500,00	7.496.000,00	3.500,00	99,95
4.02.01.2.03.0005.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.499.500,00	7.496.000,00	3.500,00	99,95
4.02.01.2.03.0005.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.499.500,00	7.496.000,00	3.500,00	99,95
4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.500.000,00	7.498.500,00	1.500,00	99,98
4.02.01.2.03.0006.51	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.498.500,00	1.500,00	99,98
4.02.01.2.03.0006.5102	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.498.500,00	1.500,00	99,98
4.02.01.2.03.0006.510201	Belanja Barang	7.500.000,00	7.498.500,00	1.500,00	99,98
4.02.01.2.03.0006.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.500.000,00	7.498.500,00	1.500,00	99,98
4.02.01.2.03.0006.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	7.498.500,00	1.500,00	99,98
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	127.031.145,00	119.595.199,00	7.435.946,00	94,15



Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun Anggaran 2024



4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	73.031.145,00	72.463.700,00	567.445,00	99,22
4.02.01.2.05.0002.51	BELANJA OPERASI	73.031.145,00	72.463.700,00	567.445,00	99,22
4.02.01.2.05.0002.5102	Belanja Barang dan Jasa	73.031.145,00	72.463.700,00	567.445,00	99,22
4.02.01.2.05.0002.510201	Belanja Barang	73.031.145,00	72.463.700,00	567.445,00	99,22
4.02.01.2.05.0002.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	73.031.145,00	72.463.700,00	567.445,00	99,22
4.02.01.2.05.0002.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.374.000,00	7.374.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.05.0002.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.757.145,00	3.189.700,00	567.445,00	84,90
4.02.01.2.05.0002.510201010061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.05.0002.510201010062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.05.0002.510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.05.0002.510201010065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	54.000.000,00	47.131.499,00	6.868.501,00	87,28
4.02.01.2.05.0009.51	BELANJA OPERASI	54.000.000,00	47.131.499,00	6.868.501,00	87,28
4.02.01.2.05.0009.5102	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	47.131.499,00	6.868.501,00	87,28
4.02.01.2.05.0009.510202	Belanja Jasa	54.000.000,00	47.131.499,00	6.868.501,00	87,28
4.02.01.2.05.0009.51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	54.000.000,00	47.131.499,00	6.868.501,00	87,28
4.02.01.2.05.0009.510202120003	Belanja Bimbingan Teknis	54.000.000,00	47.131.499,00	6.868.501,00	87,28
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.046.503.940,00	1.046.262.048,00	241.892,00	99,98
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.06.0001.51	BELANJA OPERASI	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.06.0001.5102	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.06.0001.510201	Belanja Barang	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.06.0001.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.06.0001.510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.568.000,00	100.567.000,00	1.000,00	100,00
4.02.01.2.06.0002.51	BELANJA OPERASI	100.568.000,00	100.567.000,00	1.000,00	100,00
4.02.01.2.06.0002.5102	Belanja Barang dan Jasa	100.568.000,00	100.567.000,00	1.000,00	100,00
4.02.01.2.06.0002.510201	Belanja Barang	100.568.000,00	100.567.000,00	1.000,00	100,00
4.02.01.2.06.0002.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	100.568.000,00	100.567.000,00	1.000,00	100,00
4.02.01.2.06.0002.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	100.568.000,00	100.567.000,00	1.000,00	100,00
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	472.858.060,00	472.796.265,00	61.795,00	99,99
4.02.01.2.06.0004.51	BELANJA OPERASI	472.858.060,00	472.796.265,00	61.795,00	99,99
4.02.01.2.06.0004.5102	Belanja Barang dan Jasa	472.858.060,00	472.796.265,00	61.795,00	99,99
4.02.01.2.06.0004.510201	Belanja Barang	472.858.060,00	472.796.265,00	61.795,00	99,99
4.02.01.2.06.0004.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	472.858.060,00	472.796.265,00	61.795,00	99,99
4.02.01.2.06.0004.510201010010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	0,00	0,00	0,00	0,00



Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2024



4.02.01.2.06.0004.510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	39.695.000,00	39.651.500,00	43.500,00	99,89
4.02.01.2.06.0004.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.987.900,00	5.987.000,00	900,00	99,98
4.02.01.2.06.0004.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.911.160,00	9.910.575,00	585,00	99,99
4.02.01.2.06.0004.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	65.700.000,00	65.698.190,00	1.810,00	100,00
4.02.01.2.06.0004.510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	351.564.000,00	351.549.000,00	15.000,00	100,00
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.566.600,00	59.564.600,00	2.000,00	100,00
4.02.01.2.06.0005.51	BELANJA OPERASI	59.566.600,00	59.564.600,00	2.000,00	100,00
4.02.01.2.06.0005.5102	Belanja Barang dan Jasa	59.566.600,00	59.564.600,00	2.000,00	100,00
4.02.01.2.06.0005.510201	Belanja Barang	59.566.600,00	59.564.600,00	2.000,00	100,00
4.02.01.2.06.0005.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	59.566.600,00	59.564.600,00	2.000,00	100,00
4.02.01.2.06.0005.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.630.300,00	9.630.300,00	0,00	100,00
4.02.01.2.06.0005.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.06.0005.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	38.236.300,00	38.234.300,00	2.000,00	99,99
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.280,00	14.880.280,00	120.000,00	99,20
4.02.01.2.06.0006.51	BELANJA OPERASI	15.000.280,00	14.880.280,00	120.000,00	99,20
4.02.01.2.06.0006.5102	Belanja Barang dan Jasa	15.000.280,00	14.880.280,00	120.000,00	99,20
4.02.01.2.06.0006.510201	Belanja Barang	3.660.280,00	3.540.280,00	120.000,00	96,72
4.02.01.2.06.0006.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.660.280,00	3.540.280,00	120.000,00	96,72
4.02.01.2.06.0006.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.140.000,00	2.020.000,00	120.000,00	94,39
4.02.01.2.06.0006.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.520.280,00	1.520.280,00	0,00	100,00
4.02.01.2.06.0006.510202	Belanja Jasa	11.340.000,00	11.340.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.06.0006.51020201	Belanja Jasa Kantor	11.340.000,00	11.340.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.06.0006.510202010062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	11.340.000,00	11.340.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	47.871.000,00	47.871.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.06.0007.51	BELANJA OPERASI	47.871.000,00	47.871.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.06.0007.5102	Belanja Barang dan Jasa	47.871.000,00	47.871.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.06.0007.510201	Belanja Barang	38.871.000,00	38.871.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.06.0007.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	38.871.000,00	38.871.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.06.0007.510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	38.871.000,00	38.871.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.06.0007.510202	Belanja Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.06.0007.51020201	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.06.0007.510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.065.000,00	24.038.000,00	27.000,00	99,89
4.02.01.2.06.0008.51	BELANJA OPERASI	24.065.000,00	24.038.000,00	27.000,00	99,89
4.02.01.2.06.0008.5102	Belanja Barang dan Jasa	24.065.000,00	24.038.000,00	27.000,00	99,89
4.02.01.2.06.0008.510201	Belanja Barang	24.065.000,00	24.038.000,00	27.000,00	99,89
4.02.01.2.06.0008.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	24.065.000,00	24.038.000,00	27.000,00	99,89



Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2024



4.02.01.2.06.0008.510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	24.065.000,00	24.038.000,00	27.000,00	99,89
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.915.000,00	249.884.903,00	30.097,00	99,99
4.02.01.2.06.0009.51	BELANJA OPERASI	249.915.000,00	249.884.903,00	30.097,00	99,99
4.02.01.2.06.0009.5102	Belanja Barang dan Jasa	249.915.000,00	249.884.903,00	30.097,00	99,99
4.02.01.2.06.0009.510204	Belanja Perjalanan Dinas	249.915.000,00	249.884.903,00	30.097,00	99,99
4.02.01.2.06.0009.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	249.915.000,00	249.884.903,00	30.097,00	99,99
4.02.01.2.06.0009.510204010005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	249.915.000,00	249.884.903,00	30.097,00	99,99
4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.06.0010.51	BELANJA OPERASI	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.06.0010.5102	Belanja Barang dan Jasa	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.06.0010.510201	Belanja Barang	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.06.0010.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.06.0010.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.06.0011.51	BELANJA OPERASI	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.06.0011.5102	Belanja Barang dan Jasa	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.06.0011.510202	Belanja Jasa	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.06.0011.51020201	Belanja Jasa Kantor	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.06.0011.510202010027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.06.0011.510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	124.279.800,00	122.570.525,00	1.709.275,00	98,62
4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.0001.52	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.0001.5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.0001.520202	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.0001.52020201	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.0001.520202010001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.0005.52	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.0005.5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.0005.520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.0005.52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.0005.520205020001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.229.800,00	98.740.525,00	489.275,00	99,51
4.02.01.2.07.0010.51	BELANJA OPERASI	49.229.800,00	49.040.525,00	189.275,00	99,62





4.02.01.2.07.0010.5102	Belanja Barang dan Jasa	49.229.800,00	49.040.525,00	189.275,00	99,62
4.02.01.2.07.0010.510201	Belanja Barang	39.229.800,00	39.040.525,00	189.275,00	99,52
4.02.01.2.07.0010.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	39.229.800,00	39.040.525,00	189.275,00	99,52
4.02.01.2.07.0010.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	425.000,00	386.000,00	39.000,00	90,82
4.02.01.2.07.0010.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	304.800,00	304.525,00	275,00	99,91
4.02.01.2.07.0010.510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	38.500.000,00	38.350.000,00	150.000,00	99,61
4.02.01.2.07.0010.510202	Belanja Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.07.0010.51020201	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.07.0010.510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.07.0010.52	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.700.000,00	300.000,00	99,40
4.02.01.2.07.0010.5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	49.700.000,00	300.000,00	99,40
4.02.01.2.07.0010.520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	50.000.000,00	49.700.000,00	300.000,00	99,40
4.02.01.2.07.0010.52020501	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.0010.520205010005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.0010.52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	50.000.000,00	49.700.000,00	300.000,00	99,40
4.02.01.2.07.0010.520205020001	Belanja Modal Mebel	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.07.0010.520205020004	Belanja Modal Alat Pendingin	14.500.000,00	14.200.000,00	300.000,00	97,93
4.02.01.2.07.0010.520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.07.0010.520205020007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.0010.520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.0010.52020601	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.0010.520206010002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.0010.520210	Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.0010.52021001	Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.0010.520210010003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.0010.52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.0010.520210020005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.0010.5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.0010.520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.0010.52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.0010.520301010033	Belanja Modal Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.050.000,00	23.830.000,00	1.220.000,00	95,13
4.02.01.2.07.0011.51	BELANJA OPERASI	25.050.000,00	23.830.000,00	1.220.000,00	95,13
4.02.01.2.07.0011.5102	Belanja Barang dan Jasa	25.050.000,00	23.830.000,00	1.220.000,00	95,13
4.02.01.2.07.0011.510201	Belanja Barang	8.290.000,00	7.070.000,00	1.220.000,00	85,28
4.02.01.2.07.0011.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8.290.000,00	7.070.000,00	1.220.000,00	85,28



Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2024



4.02.01.2.07.0011.510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	7.070.000,00	7.070.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.07.0011.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00
4.02.01.2.07.0011.510202	Belanja Jasa	16.760.000,00	16.760.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.07.0011.51020201	Belanja Jasa Kantor	11.760.000,00	11.760.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.07.0011.510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11.760.000,00	11.760.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.07.0011.51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.07.0011.510202080003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	995.432.688,00	984.972.758,00	10.459.930,00	98,95
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.08.0001.51	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.08.0001.5102	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.08.0001.510201	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.08.0001.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.08.0001.510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	287.200.000,00	281.325.118,00	5.874.882,00	97,95
4.02.01.2.08.0002.51	BELANJA OPERASI	287.200.000,00	281.325.118,00	5.874.882,00	97,95
4.02.01.2.08.0002.5102	Belanja Barang dan Jasa	287.200.000,00	281.325.118,00	5.874.882,00	97,95
4.02.01.2.08.0002.510201	Belanja Barang	5.200.000,00	5.196.000,00	4.000,00	99,92
4.02.01.2.08.0002.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.200.000,00	5.196.000,00	4.000,00	99,92
4.02.01.2.08.0002.510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.200.000,00	5.196.000,00	4.000,00	99,92
4.02.01.2.08.0002.510202	Belanja Jasa	282.000.000,00	276.129.118,00	5.870.882,00	97,92
4.02.01.2.08.0002.51020201	Belanja Jasa Kantor	282.000.000,00	276.129.118,00	5.870.882,00	97,92
4.02.01.2.08.0002.510202010060	Belanja Tagihan Air	66.000.000,00	60.379.118,00	5.620.882,00	91,48
4.02.01.2.08.0002.510202010061	Belanja Tagihan Listrik	166.000.000,00	166.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.08.0002.510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	50.000.000,00	49.750.000,00	250.000,00	99,50
4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.0003.51	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.0003.5102	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.0003.510201	Belanja Barang	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.0003.51020102	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.0003.510201020003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	703.232.688,00	698.647.640,00	4.585.048,00	99,35
4.02.01.2.08.0004.51	BELANJA OPERASI	703.232.688,00	698.647.640,00	4.585.048,00	99,35
4.02.01.2.08.0004.5101	Belanja Pegawai	200.316.000,00	196.936.000,00	3.380.000,00	98,31
4.02.01.2.08.0004.510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan ASN	200.316.000,00	196.936.000,00	3.380.000,00	98,31
4.02.01.2.08.0004.51010307	Belanja Honorarium	200.316.000,00	196.936.000,00	3.380.000,00	98,31





Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2024



4.02.01.2.08.0004.510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	183.996.000,00	180.616.200,00	3.379.800,00	98,16
4.02.01.2.08.0004.510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	16.320.000,00	16.319.800,00	200,00	100,00
4.02.01.2.08.0004.5102	Belanja Barang dan Jasa	502.916.688,00	501.711.640,00	1.205.048,00	99,76
4.02.01.2.08.0004.510201	Belanja Barang	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00
4.02.01.2.08.0004.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00
4.02.01.2.08.0004.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00
4.02.01.2.08.0004.510202	Belanja Jasa	502.800.688,00	501.711.640,00	1.089.048,00	99,78
4.02.01.2.08.0004.51020201	Belanja Jasa Kantor	469.900.000,00	469.000.000,00	900.000,00	99,81
4.02.01.2.08.0004.510202010017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	31.500.000,00	31.000.000,00	500.000,00	98,41
4.02.01.2.08.0004.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	438.400.000,00	438.000.000,00	400.000,00	99,91
4.02.01.2.08.0004.51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	32.900.688,00	32.711.640,00	189.048,00	99,43
4.02.01.2.08.0004.510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	29.944.608,00	29.903.640,00	40.968,00	99,86
4.02.01.2.08.0004.510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.478.040,00	1.353.600,00	124.440,00	91,58
4.02.01.2.08.0004.510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.478.040,00	1.454.400,00	23.640,00	98,40
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	763.789.900,00	745.077.971,00	18.711.929,00	97,55
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	373.300.900,00	363.037.196,00	10.263.704,00	97,25
4.02.01.2.09.0001.51	BELANJA OPERASI	373.300.900,00	363.037.196,00	10.263.704,00	97,25
4.02.01.2.09.0001.5102	Belanja Barang dan Jasa	373.300.900,00	363.037.196,00	10.263.704,00	97,25
4.02.01.2.09.0001.510201	Belanja Barang	363.130.900,00	353.045.196,00	10.085.704,00	97,22
4.02.01.2.09.0001.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	363.130.900,00	353.045.196,00	10.085.704,00	97,22
4.02.01.2.09.0001.510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	194.649.300,00	185.971.500,00	8.677.800,00	95,54
4.02.01.2.09.0001.510201010013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	168.481.600,00	167.073.696,00	1.407.904,00	99,16
4.02.01.2.09.0001.510203	Belanja Pemeliharaan	10.170.000,00	9.992.000,00	178.000,00	98,25
4.02.01.2.09.0001.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.170.000,00	9.992.000,00	178.000,00	98,25
4.02.01.2.09.0001.510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10.170.000,00	9.992.000,00	178.000,00	98,25
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	201.281.400,00	200.019.325,00	1.262.075,00	99,37
4.02.01.2.09.0002.51	BELANJA OPERASI	201.281.400,00	200.019.325,00	1.262.075,00	99,37
4.02.01.2.09.0002.5102	Belanja Barang dan Jasa	201.281.400,00	200.019.325,00	1.262.075,00	99,37
4.02.01.2.09.0002.510201	Belanja Barang	165.841.400,00	164.794.925,00	1.046.475,00	99,37
4.02.01.2.09.0002.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	165.841.400,00	164.794.925,00	1.046.475,00	99,37
4.02.01.2.09.0002.510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	165.029.400,00	163.989.000,00	1.040.400,00	99,37
4.02.01.2.09.0002.510201010023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00





Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2024



4.02.01.2.09.0002.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	812.000,00	805.925,00	6.075,00	99,25
4.02.01.2.09.0002.510202	Belanja Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.09.0002.51020201	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.09.0002.510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.09.0002.510204	Belanja Perjalanan Dinas	25.440.000,00	25.224.400,00	215.600,00	99,15
4.02.01.2.09.0002.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.440.000,00	25.224.400,00	215.600,00	99,15
4.02.01.2.09.0002.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.440.000,00	25.224.400,00	215.600,00	99,15
4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.0005.52	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.0005.5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.0005.520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.0005.52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.0005.520205020001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.720.000,00	75.228.000,00	5.492.000,00	93,20
4.02.01.2.09.0006.51	BELANJA OPERASI	80.720.000,00	75.228.000,00	5.492.000,00	93,20
4.02.01.2.09.0006.5102	Belanja Barang dan Jasa	80.720.000,00	75.228.000,00	5.492.000,00	93,20
4.02.01.2.09.0006.510201	Belanja Barang	7.560.000,00	2.400.000,00	5.160.000,00	31,75
4.02.01.2.09.0006.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.560.000,00	2.400.000,00	5.160.000,00	31,75
4.02.01.2.09.0006.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.160.000,00	0,00	5.160.000,00	0,00
4.02.01.2.09.0006.510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.09.0006.510203	Belanja Pemeliharaan	73.160.000,00	72.828.000,00	332.000,00	99,55
4.02.01.2.09.0006.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	73.160.000,00	72.828.000,00	332.000,00	99,55
4.02.01.2.09.0006.510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	19.520.000,00	19.500.000,00	20.000,00	99,90
4.02.01.2.09.0006.510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	15.000.000,00	14.900.000,00	100.000,00	99,33
4.02.01.2.09.0006.510203020406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	22.080.000,00	21.889.000,00	191.000,00	99,13
4.02.01.2.09.0006.510203020411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	16.560.000,00	16.539.000,00	21.000,00	99,87
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.483.000,00	49.429.450,00	53.550,00	99,89
4.02.01.2.09.0009.51	BELANJA OPERASI	49.483.000,00	49.429.450,00	53.550,00	99,89
4.02.01.2.09.0009.5102	Belanja Barang dan Jasa	49.483.000,00	49.429.450,00	53.550,00	99,89
4.02.01.2.09.0009.510201	Belanja Barang	30.583.000,00	30.529.450,00	53.550,00	99,82
4.02.01.2.09.0009.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	30.583.000,00	30.529.450,00	53.550,00	99,82
4.02.01.2.09.0009.510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	11.565.000,00	11.512.000,00	53.000,00	99,54
4.02.01.2.09.0009.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.618.000,00	10.617.500,00	500,00	100,00
4.02.01.2.09.0009.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.400.000,00	8.399.950,00	50,00	100,00
4.02.01.2.09.0009.510202	Belanja Jasa	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	100,00





Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2024



4.02.01.2.09.0009.51020201	Belanja Jasa Kantor	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.09.0009.510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.09.0009.52	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.0009.5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.0009.520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.0009.52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.0009.520301010030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.0010.52	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.0010.5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.0010.520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.0010.52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.0010.520301010001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.0010.520301010030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.004.600,00	57.364.000,00	1.640.600,00	97,22
4.02.01.2.09.0011.51	BELANJA OPERASI	59.004.600,00	57.364.000,00	1.640.600,00	97,22
4.02.01.2.09.0011.5102	Belanja Barang dan Jasa	59.004.600,00	57.364.000,00	1.640.600,00	97,22
4.02.01.2.09.0011.510201	Belanja Barang	49.164.600,00	47.564.000,00	1.600.600,00	96,74
4.02.01.2.09.0011.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	49.164.600,00	47.564.000,00	1.600.600,00	96,74
4.02.01.2.09.0011.510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	42.828.000,00	41.264.000,00	1.564.000,00	96,35
4.02.01.2.09.0011.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.09.0011.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.080.000,00	1.050.000,00	30.000,00	97,22
4.02.01.2.09.0011.510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.09.0011.510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.006.600,00	3.000.000,00	6.600,00	99,78
4.02.01.2.09.0011.510202	Belanja Jasa	9.840.000,00	9.800.000,00	40.000,00	99,59
4.02.01.2.09.0011.51020201	Belanja Jasa Kantor	9.840.000,00	9.800.000,00	40.000,00	99,59
4.02.01.2.09.0011.510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.840.000,00	9.800.000,00	40.000,00	99,59
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	15.367.660.841,00	15.219.855.284,00	147.805.557,00	99,04
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	14.775.870.261,00	14.629.215.529,00	146.654.732,00	99,01
4.02.01.2.15.0001.51	BELANJA OPERASI	14.775.870.261,00	14.629.215.529,00	146.654.732,00	99,01
4.02.01.2.15.0001.5101	Belanja Pegawai	14.775.870.261,00	14.629.215.529,00	146.654.732,00	99,01
4.02.01.2.15.0001.510104	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	14.591.070.261,00	14.461.215.529,00	129.854.732,00	99,11
4.02.01.2.15.0001.51010401	Belanja Uang Representasi DPRD	667.282.620,00	667.170.000,00	112.620,00	99,98
4.02.01.2.15.0001.510104010001	Belanja Uang Representasi DPRD	667.282.620,00	667.170.000,00	112.620,00	99,98
4.02.01.2.15.0001.51010402	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	74.825.180,00	64.386.000,00	10.439.180,00	86,05





Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2024



4.02.01.2.15.0001.510104020001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	74.825.180,00	64.386.000,00	10.439.180,00	86,05
4.02.01.2.15.0001.51010403	Belanja Tunjangan Beras DPRD	76.520.180,00	75.823.748,00	696.432,00	99,09
4.02.01.2.15.0001.510104030001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	76.520.180,00	75.823.748,00	696.432,00	99,09
4.02.01.2.15.0001.51010404	Belanja Uang Paket DPRD	57.606.500,00	57.259.510,00	346.990,00	99,40
4.02.01.2.15.0001.510104040001	Belanja Uang Paket DPRD	57.606.500,00	57.259.510,00	346.990,00	99,40
4.02.01.2.15.0001.51010405	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	969.528.000,00	967.396.507,00	2.131.493,00	99,78
4.02.01.2.15.0001.510104050001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	969.528.000,00	967.396.507,00	2.131.493,00	99,78
4.02.01.2.15.0001.51010407	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	86.417.100,00	64.812.825,00	21.604.275,00	75,00
4.02.01.2.15.0001.510104070001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	86.417.100,00	64.812.825,00	21.604.275,00	75,00
4.02.01.2.15.0001.51010408	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.778.300.000,00	3.769.500.000,00	8.800.000,00	99,77
4.02.01.2.15.0001.510104080001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.778.300.000,00	3.769.500.000,00	8.800.000,00	99,77
4.02.01.2.15.0001.51010409	Belanja Tunjangan Reses DPRD	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.15.0001.510104090001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.15.0001.51010410	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	262.451.881,00	199.151.262,00	63.300.619,00	75,88
4.02.01.2.15.0001.510104100001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	262.451.881,00	199.151.262,00	63.300.619,00	75,88
4.02.01.2.15.0001.51010412	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.952.615.675,00	3.939.805.677,00	12.809.998,00	99,68
4.02.01.2.15.0001.510104120001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	59.534.346,00	56.389.494,00	3.144.852,00	94,72
4.02.01.2.15.0001.510104120002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.398.188,00	1.378.188,00	20.000,00	98,57
4.02.01.2.15.0001.510104120003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.154.564,00	4.134.564,00	20.000,00	99,52
4.02.01.2.15.0001.510104120004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.887.528.577,00	3.877.903.431,00	9.625.146,00	99,75
4.02.01.2.15.0001.51010413	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.759.600.000,00	3.750.600.000,00	9.000.000,00	99,76
4.02.01.2.15.0001.510104130001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.759.600.000,00	3.750.600.000,00	9.000.000,00	99,76
4.02.01.2.15.0001.51010414	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	275.923.125,00	275.310.000,00	613.125,00	99,78
4.02.01.2.15.0001.510104140001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	275.923.125,00	275.310.000,00	613.125,00	99,78
4.02.01.2.15.0001.510106	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	184.800.000,00	168.000.000,00	16.800.000,00	90,91
4.02.01.2.15.0001.51010601	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	184.800.000,00	168.000.000,00	16.800.000,00	90,91
4.02.01.2.15.0001.510106010001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	184.800.000,00	168.000.000,00	16.800.000,00	90,91
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	403.000.000,00	402.410.775,00	589.225,00	99,85
4.02.01.2.15.0002.51	BELANJA OPERASI	403.000.000,00	402.410.775,00	589.225,00	99,85
4.02.01.2.15.0002.5102	Belanja Barang dan Jasa	403.000.000,00	402.410.775,00	589.225,00	99,85
4.02.01.2.15.0002.510201	Belanja Barang	385.264.000,00	385.243.775,00	20.225,00	99,99
4.02.01.2.15.0002.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	385.264.000,00	385.243.775,00	20.225,00	99,99
4.02.01.2.15.0002.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.663.000,00	8.660.900,00	2.100,00	99,98
4.02.01.2.15.0002.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.901.000,00	7.882.875,00	18.125,00	99,77
4.02.01.2.15.0002.510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00





Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah
Tahun Anggaran 2024



4.02.01.2.15.0002.510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.15.0002.510201010060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	142.500.000,00	142.500.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.15.0002.510201010061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.15.0002.510201010062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.15.0002.510204	Belanja Perjalanan Dinas	17.736.000,00	17.167.000,00	569.000,00	96,79
4.02.01.2.15.0002.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.736.000,00	17.167.000,00	569.000,00	96,79
4.02.01.2.15.0002.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.736.000,00	17.167.000,00	569.000,00	96,79
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	188.790.580,00	188.228.980,00	561.600,00	99,70
4.02.01.2.15.0003.51	BELANJA OPERASI	188.790.580,00	188.228.980,00	561.600,00	99,70
4.02.01.2.15.0003.5102	Belanja Barang dan Jasa	188.790.580,00	188.228.980,00	561.600,00	99,70
4.02.01.2.15.0003.510201	Belanja Barang	12.169.580,00	12.169.580,00	0,00	100,00
4.02.01.2.15.0003.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	12.169.580,00	12.169.580,00	0,00	100,00
4.02.01.2.15.0003.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.265.100,00	2.265.100,00	0,00	100,00
4.02.01.2.15.0003.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.079.080,00	3.079.080,00	0,00	100,00
4.02.01.2.15.0003.510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.675.400,00	2.675.400,00	0,00	100,00
4.02.01.2.15.0003.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.15.0003.510202	Belanja Jasa	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.15.0003.51020201	Belanja Jasa Kantor	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.15.0003.510202010073	Belanja Medical Check Up	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.15.0003.510204	Belanja Perjalanan Dinas	124.621.000,00	124.059.400,00	561.600,00	99,55
4.02.01.2.15.0003.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	124.621.000,00	124.059.400,00	561.600,00	99,55
4.02.01.2.15.0003.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	124.621.000,00	124.059.400,00	561.600,00	99,55
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	810.479.000,00	783.340.900,00	27.138.100,00	96,65
4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.0001.51	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.0001.5102	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.0001.510201	Belanja Barang	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.0001.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.0001.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.0002.51	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.0002.5102	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.0002.510201	Belanja Barang	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.0002.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.0002.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	396.319.000,00	370.196.900,00	26.122.100,00	93,41





Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2024



4.02.01.2.16.0003.51	BELANJA OPERASI	396.319.000,00	370.196.900,00	26.122.100,00	93,41
4.02.01.2.16.0003.5102	Belanja Barang dan Jasa	396.319.000,00	370.196.900,00	26.122.100,00	93,41
4.02.01.2.16.0003.510201	Belanja Barang	334.073.000,00	329.594.500,00	4.478.500,00	98,66
4.02.01.2.16.0003.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	334.073.000,00	329.594.500,00	4.478.500,00	98,66
4.02.01.2.16.0003.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.208.000,00	8.208.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.16.0003.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	30.001.000,00	29.982.500,00	18.500,00	99,94
4.02.01.2.16.0003.510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.16.0003.510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	924.000,00	882.000,00	42.000,00	95,45
4.02.01.2.16.0003.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	293.740.000,00	289.322.000,00	4.418.000,00	98,50
4.02.01.2.16.0003.510202	Belanja Jasa	27.400.000,00	6.000.000,00	21.400.000,00	21,90
4.02.01.2.16.0003.51020201	Belanja Jasa Kantor	27.400.000,00	6.000.000,00	21.400.000,00	21,90
4.02.01.2.16.0003.510202010007	Honorarium Rohaniwan	27.400.000,00	6.000.000,00	21.400.000,00	21,90
4.02.01.2.16.0003.51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.0003.510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.2.16.0003.510204	Belanja Perjalanan Dinas	34.846.000,00	34.602.400,00	243.600,00	99,30
4.02.01.2.16.0003.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.846.000,00	34.602.400,00	243.600,00	99,30
4.02.01.2.16.0003.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.846.000,00	34.602.400,00	243.600,00	99,30
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	414.160.000,00	413.144.000,00	1.016.000,00	99,75
4.02.01.2.16.0004.51	BELANJA OPERASI	414.160.000,00	413.144.000,00	1.016.000,00	99,75
4.02.01.2.16.0004.5102	Belanja Barang dan Jasa	414.160.000,00	413.144.000,00	1.016.000,00	99,75
4.02.01.2.16.0004.510201	Belanja Barang	414.160.000,00	413.144.000,00	1.016.000,00	99,75
4.02.01.2.16.0004.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	414.160.000,00	413.144.000,00	1.016.000,00	99,75
4.02.01.2.16.0004.510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.160.000,00	12.144.000,00	16.000,00	99,87
4.02.01.2.16.0004.510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00
4.02.01.2.16.0004.510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	360.000.000,00	359.000.000,00	1.000.000,00	99,72
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	11.732.046.322,00	11.534.754.965,00	197.291.357,00	98,32
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.593.915.500,00	2.569.390.286,00	24.525.214,00	99,05
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	515.185.500,00	513.356.925,00	1.828.575,00	99,65
4.02.02.2.01.0001.51	BELANJA OPERASI	515.185.500,00	513.356.925,00	1.828.575,00	99,65
4.02.02.2.01.0001.5102	Belanja Barang dan Jasa	515.185.500,00	513.356.925,00	1.828.575,00	99,65
4.02.02.2.01.0001.510201	Belanja Barang	24.795.500,00	24.590.000,00	205.500,00	99,17
4.02.02.2.01.0001.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	24.795.500,00	24.590.000,00	205.500,00	99,17
4.02.02.2.01.0001.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.595.500,00	2.590.000,00	5.500,00	99,79
4.02.02.2.01.0001.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.200.000,00	3.000.000,00	200.000,00	93,75
4.02.02.2.01.0001.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00



Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2024



4.02.02.2.01.0001.510204	Belanja Perjalanan Dinas	490.390.000,00	488.766.925,00	1.623.075,00	99,67
4.02.02.2.01.0001.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	490.390.000,00	488.766.925,00	1.623.075,00	99,67
4.02.02.2.01.0001.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	490.390.000,00	488.766.925,00	1.623.075,00	99,67
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	1.256.338.000,00	1.248.730.003,00	7.607.997,00	99,39
4.02.02.2.01.0002.51	BELANJA OPERASI	1.256.338.000,00	1.248.730.003,00	7.607.997,00	99,39
4.02.02.2.01.0002.5102	Belanja Barang dan Jasa	1.256.338.000,00	1.248.730.003,00	7.607.997,00	99,39
4.02.02.2.01.0002.510201	Belanja Barang	8.412.000,00	8.412.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.01.0002.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8.412.000,00	8.412.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.01.0002.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.912.000,00	1.912.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.01.0002.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.01.0002.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.01.0002.510204	Belanja Perjalanan Dinas	1.247.926.000,00	1.240.318.003,00	7.607.997,00	99,39
4.02.02.2.01.0002.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.247.926.000,00	1.240.318.003,00	7.607.997,00	99,39
4.02.02.2.01.0002.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.247.926.000,00	1.240.318.003,00	7.607.997,00	99,39
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	304.482.000,00	294.066.194,00	10.415.806,00	96,58
4.02.02.2.01.0003.51	BELANJA OPERASI	304.482.000,00	294.066.194,00	10.415.806,00	96,58
4.02.02.2.01.0003.5102	Belanja Barang dan Jasa	304.482.000,00	294.066.194,00	10.415.806,00	96,58
4.02.02.2.01.0003.510201	Belanja Barang	4.644.000,00	4.644.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.01.0003.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.644.000,00	4.644.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.01.0003.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	594.000,00	594.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.01.0003.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.01.0003.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.01.0003.510204	Belanja Perjalanan Dinas	299.838.000,00	289.422.194,00	10.415.806,00	96,53
4.02.02.2.01.0003.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	299.838.000,00	289.422.194,00	10.415.806,00	96,53
4.02.02.2.01.0003.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	299.838.000,00	289.422.194,00	10.415.806,00	96,53
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	150.000.000,00	145.483.000,00	4.517.000,00	96,99
4.02.02.2.01.0004.51	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	145.483.000,00	4.517.000,00	96,99
4.02.02.2.01.0004.5102	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	145.483.000,00	4.517.000,00	96,99
4.02.02.2.01.0004.510201	Belanja Barang	4.253.000,00	4.253.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.01.0004.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.253.000,00	4.253.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.01.0004.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.078.000,00	1.078.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.01.0004.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.01.0004.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.01.0004.510202	Belanja Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.01.0004.51020201	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.01.0004.510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00





Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2024



4.02.02.2.01.0004.510204	Belanja Perjalanan Dinas	45.747.000,00	41.230.000,00	4.517.000,00	90,13
4.02.02.2.01.0004.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.747.000,00	41.230.000,00	4.517.000,00	90,13
4.02.02.2.01.0004.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45.747.000,00	41.230.000,00	4.517.000,00	90,13
4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	367.910.000,00	367.754.164,00	155.836,00	99,96
4.02.02.2.01.0005.51	BELANJA OPERASI	367.910.000,00	367.754.164,00	155.836,00	99,96
4.02.02.2.01.0005.5102	Belanja Barang dan Jasa	367.910.000,00	367.754.164,00	155.836,00	99,96
4.02.02.2.01.0005.510201	Belanja Barang	3.155.000,00	3.007.000,00	148.000,00	95,31
4.02.02.2.01.0005.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.155.000,00	3.007.000,00	148.000,00	95,31
4.02.02.2.01.0005.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	400.000,00	332.000,00	68.000,00	83,00
4.02.02.2.01.0005.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	380.000,00	300.000,00	80.000,00	78,95
4.02.02.2.01.0005.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.01.0005.510204	Belanja Perjalanan Dinas	364.755.000,00	364.747.164,00	7.836,00	100,00
4.02.02.2.01.0005.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	364.755.000,00	364.747.164,00	7.836,00	100,00
4.02.02.2.01.0005.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	364.755.000,00	364.747.164,00	7.836,00	100,00
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.832.610.620,00	1.828.782.498,00	3.828.122,00	99,79
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	131.087.000,00	130.980.925,00	106.075,00	99,92
4.02.02.2.02.0001.51	BELANJA OPERASI	131.087.000,00	130.980.925,00	106.075,00	99,92
4.02.02.2.02.0001.5102	Belanja Barang dan Jasa	131.087.000,00	130.980.925,00	106.075,00	99,92
4.02.02.2.02.0001.510201	Belanja Barang	39.750.000,00	39.682.000,00	68.000,00	99,83
4.02.02.2.02.0001.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	39.750.000,00	39.682.000,00	68.000,00	99,83
4.02.02.2.02.0001.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.070.000,00	4.048.000,00	22.000,00	99,46
4.02.02.2.02.0001.510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.02.0001.510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.185.000,00	3.185.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.02.0001.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.395.000,00	31.349.000,00	46.000,00	99,85
4.02.02.2.02.0001.510204	Belanja Perjalanan Dinas	91.337.000,00	91.298.925,00	38.075,00	99,96
4.02.02.2.02.0001.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	91.337.000,00	91.298.925,00	38.075,00	99,96
4.02.02.2.02.0001.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	91.337.000,00	91.298.925,00	38.075,00	99,96
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	179.097.000,00	177.000.424,00	2.096.576,00	98,83
4.02.02.2.02.0002.51	BELANJA OPERASI	179.097.000,00	177.000.424,00	2.096.576,00	98,83
4.02.02.2.02.0002.5102	Belanja Barang dan Jasa	179.097.000,00	177.000.424,00	2.096.576,00	98,83
4.02.02.2.02.0002.510201	Belanja Barang	40.000.000,00	39.078.000,00	922.000,00	97,70
4.02.02.2.02.0002.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	40.000.000,00	39.078.000,00	922.000,00	97,70
4.02.02.2.02.0002.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.747.000,00	2.825.000,00	922.000,00	75,39
4.02.02.2.02.0002.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	323.000,00	323.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.02.0002.510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.02.0002.510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.435.000,00	3.435.000,00	0,00	100,00



Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2024



4.02.02.2.02.0002.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.395.000,00	31.395.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.02.0002.510204	Belanja Perjalanan Dinas	139.097.000,00	137.922.424,00	1.174.576,00	99,16
4.02.02.2.02.0002.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	139.097.000,00	137.922.424,00	1.174.576,00	99,16
4.02.02.2.02.0002.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	139.097.000,00	137.922.424,00	1.174.576,00	99,16
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	505.415.000,00	505.368.285,00	46.715,00	99,99
4.02.02.2.02.0003.51	BELANJA OPERASI	505.415.000,00	505.368.285,00	46.715,00	99,99
4.02.02.2.02.0003.5102	Belanja Barang dan Jasa	505.415.000,00	505.368.285,00	46.715,00	99,99
4.02.02.2.02.0003.510201	Belanja Barang	39.569.000,00	39.523.000,00	46.000,00	99,88
4.02.02.2.02.0003.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	39.569.000,00	39.523.000,00	46.000,00	99,88
4.02.02.2.02.0003.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.669.000,00	4.669.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.02.0003.510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.02.0003.510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.505.000,00	2.505.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.02.0003.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.395.000,00	31.349.000,00	46.000,00	99,85
4.02.02.2.02.0003.510204	Belanja Perjalanan Dinas	465.846.000,00	465.845.285,00	715,00	100,00
4.02.02.2.02.0003.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	465.846.000,00	465.845.285,00	715,00	100,00
4.02.02.2.02.0003.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	465.846.000,00	465.845.285,00	715,00	100,00
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	507.694.920,00	507.616.372,00	78.548,00	99,98
4.02.02.2.02.0004.51	BELANJA OPERASI	507.694.920,00	507.616.372,00	78.548,00	99,98
4.02.02.2.02.0004.5102	Belanja Barang dan Jasa	507.694.920,00	507.616.372,00	78.548,00	99,98
4.02.02.2.02.0004.510201	Belanja Barang	40.684.920,00	40.622.000,00	62.920,00	99,85
4.02.02.2.02.0004.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	40.684.920,00	40.622.000,00	62.920,00	99,85
4.02.02.2.02.0004.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.039.920,00	7.023.000,00	16.920,00	99,76
4.02.02.2.02.0004.510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.02.0004.510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.02.0004.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.395.000,00	31.349.000,00	46.000,00	99,85
4.02.02.2.02.0004.510204	Belanja Perjalanan Dinas	467.010.000,00	466.994.372,00	15.628,00	100,00
4.02.02.2.02.0004.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	467.010.000,00	466.994.372,00	15.628,00	100,00
4.02.02.2.02.0004.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	467.010.000,00	466.994.372,00	15.628,00	100,00
4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	115.567.700,00	114.838.440,00	729.260,00	99,37
4.02.02.2.02.0005.51	BELANJA OPERASI	115.567.700,00	114.838.440,00	729.260,00	99,37
4.02.02.2.02.0005.5102	Belanja Barang dan Jasa	115.567.700,00	114.838.440,00	729.260,00	99,37
4.02.02.2.02.0005.510201	Belanja Barang	24.230.700,00	24.230.000,00	700,00	100,00
4.02.02.2.02.0005.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	24.230.700,00	24.230.000,00	700,00	100,00
4.02.02.2.02.0005.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.869.700,00	1.869.000,00	700,00	99,96
4.02.02.2.02.0005.510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	372.000,00	372.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.02.0005.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.989.000,00	21.989.000,00	0,00	100,00





Catatan Atas Laporan Keuangan

Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang

Tahun Anggaran 2024



4.02.02.2.02.0005.510204	Belanja Perjalanan Dinas	91.337.000,00	90.608.440,00	728.560,00	99,20
4.02.02.2.02.0005.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	91.337.000,00	90.608.440,00	728.560,00	99,20
4.02.02.2.02.0005.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	91.337.000,00	90.608.440,00	728.560,00	99,20
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	393.749.000,00	392.978.052,00	770.948,00	99,80
4.02.02.2.02.0006.51	BELANJA OPERASI	393.749.000,00	392.978.052,00	770.948,00	99,80
4.02.02.2.02.0006.5102	Belanja Barang dan Jasa	393.749.000,00	392.978.052,00	770.948,00	99,80
4.02.02.2.02.0006.510201	Belanja Barang	39.532.000,00	39.486.000,00	46.000,00	99,88
4.02.02.2.02.0006.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	39.532.000,00	39.486.000,00	46.000,00	99,88
4.02.02.2.02.0006.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.137.000,00	7.137.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.02.0006.510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.02.0006.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.395.000,00	31.349.000,00	46.000,00	99,85
4.02.02.2.02.0006.510204	Belanja Perjalanan Dinas	354.217.000,00	353.492.052,00	724.948,00	99,80
4.02.02.2.02.0006.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	354.217.000,00	353.492.052,00	724.948,00	99,80
4.02.02.2.02.0006.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	354.217.000,00	353.492.052,00	724.948,00	99,80
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.735.694.600,00	1.724.331.903,00	11.362.697,00	99,35
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	216.448.040,00	214.440.050,00	2.007.990,00	99,07
4.02.02.2.03.0001.51	BELANJA OPERASI	216.448.040,00	214.440.050,00	2.007.990,00	99,07
4.02.02.2.03.0001.5102	Belanja Barang dan Jasa	216.448.040,00	214.440.050,00	2.007.990,00	99,07
4.02.02.2.03.0001.510201	Belanja Barang	21.928.040,00	21.412.150,00	515.890,00	97,65
4.02.02.2.03.0001.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	21.928.040,00	21.412.150,00	515.890,00	97,65
4.02.02.2.03.0001.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.275.400,00	3.275.000,00	400,00	99,99
4.02.02.2.03.0001.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.077.640,00	2.992.150,00	85.490,00	97,22
4.02.02.2.03.0001.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.575.000,00	15.145.000,00	430.000,00	97,24
4.02.02.2.03.0001.510204	Belanja Perjalanan Dinas	194.520.000,00	193.027.900,00	1.492.100,00	99,23
4.02.02.2.03.0001.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	194.520.000,00	193.027.900,00	1.492.100,00	99,23
4.02.02.2.03.0001.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	194.520.000,00	193.027.900,00	1.492.100,00	99,23
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	201.402.720,00	199.962.775,00	1.439.945,00	99,29
4.02.02.2.03.0002.51	BELANJA OPERASI	201.402.720,00	199.962.775,00	1.439.945,00	99,29
4.02.02.2.03.0002.5102	Belanja Barang dan Jasa	201.402.720,00	199.962.775,00	1.439.945,00	99,29
4.02.02.2.03.0002.510201	Belanja Barang	21.027.720,00	20.481.450,00	546.270,00	97,40
4.02.02.2.03.0002.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	21.027.720,00	20.481.450,00	546.270,00	97,40
4.02.02.2.03.0002.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.072.000,00	3.072.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.03.0002.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.305.720,00	1.269.450,00	36.270,00	97,22
4.02.02.2.03.0002.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.650.000,00	16.140.000,00	510.000,00	96,94
4.02.02.2.03.0002.510204	Belanja Perjalanan Dinas	180.375.000,00	179.481.325,00	893.675,00	99,50
4.02.02.2.03.0002.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	180.375.000,00	179.481.325,00	893.675,00	99,50



Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2024



4.02.02.2.03.0002.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	180.375.000,00	179.481.325,00	893.675,00	99,50
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	216.448.080,00	213.284.566,00	3.163.514,00	98,54
4.02.02.2.03.0003.51	BELANJA OPERASI	216.448.080,00	213.284.566,00	3.163.514,00	98,54
4.02.02.2.03.0003.5102	Belanja Barang dan Jasa	216.448.080,00	213.284.566,00	3.163.514,00	98,54
4.02.02.2.03.0003.510201	Belanja Barang	29.323.080,00	27.867.050,00	1.456.030,00	95,03
4.02.02.2.03.0003.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	29.323.080,00	27.867.050,00	1.456.030,00	95,03
4.02.02.2.03.0003.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.289.000,00	3.698.500,00	590.500,00	86,23
4.02.02.2.03.0003.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.159.080,00	4.043.550,00	115.530,00	97,22
4.02.02.2.03.0003.510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	600.000,00	500.000,00	100.000,00	83,33
4.02.02.2.03.0003.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.275.000,00	19.625.000,00	650.000,00	96,79
4.02.02.2.03.0003.510204	Belanja Perjalanan Dinas	187.125.000,00	185.417.516,00	1.707.484,00	99,09
4.02.02.2.03.0003.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	187.125.000,00	185.417.516,00	1.707.484,00	99,09
4.02.02.2.03.0003.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	187.125.000,00	185.417.516,00	1.707.484,00	99,09
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	204.594.880,00	202.517.725,00	2.077.155,00	98,98
4.02.02.2.03.0004.51	BELANJA OPERASI	204.594.880,00	202.517.725,00	2.077.155,00	98,98
4.02.02.2.03.0004.5102	Belanja Barang dan Jasa	204.594.880,00	202.517.725,00	2.077.155,00	98,98
4.02.02.2.03.0004.510201	Belanja Barang	9.319.880,00	9.067.500,00	252.380,00	97,29
4.02.02.2.03.0004.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	9.319.880,00	9.067.500,00	252.380,00	97,29
4.02.02.2.03.0004.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.135.000,00	2.134.500,00	500,00	99,98
4.02.02.2.03.0004.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	479.880,00	479.000,00	880,00	99,82
4.02.02.2.03.0004.510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300.000,00	250.000,00	50.000,00	83,33
4.02.02.2.03.0004.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.405.000,00	6.204.000,00	201.000,00	96,86
4.02.02.2.03.0004.510204	Belanja Perjalanan Dinas	195.275.000,00	193.450.225,00	1.824.775,00	99,07
4.02.02.2.03.0004.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	195.275.000,00	193.450.225,00	1.824.775,00	99,07
4.02.02.2.03.0004.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	195.275.000,00	193.450.225,00	1.824.775,00	99,07
4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	362.624.000,00	362.605.450,00	18.550,00	99,99
4.02.02.2.03.0005.51	BELANJA OPERASI	362.624.000,00	362.605.450,00	18.550,00	99,99
4.02.02.2.03.0005.5102	Belanja Barang dan Jasa	362.624.000,00	362.605.450,00	18.550,00	99,99
4.02.02.2.03.0005.510201	Belanja Barang	5.974.000,00	5.962.750,00	11.250,00	99,81
4.02.02.2.03.0005.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.974.000,00	5.962.750,00	11.250,00	99,81
4.02.02.2.03.0005.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.03.0005.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	405.000,00	393.750,00	11.250,00	97,22
4.02.02.2.03.0005.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.689.000,00	2.689.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.03.0005.510204	Belanja Perjalanan Dinas	356.650.000,00	356.642.700,00	7.300,00	100,00
4.02.02.2.03.0005.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	356.650.000,00	356.642.700,00	7.300,00	100,00
4.02.02.2.03.0005.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	356.650.000,00	356.642.700,00	7.300,00	100,00



Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2024



4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	50.000.000,00	48.771.800,00	1.228.200,00	97,54
4.02.02.2.03.0006.51	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	48.771.800,00	1.228.200,00	97,54
4.02.02.2.03.0006.5102	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	48.771.800,00	1.228.200,00	97,54
4.02.02.2.03.0006.510201	Belanja Barang	18.935.000,00	18.084.000,00	851.000,00	95,51
4.02.02.2.03.0006.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	18.935.000,00	18.084.000,00	851.000,00	95,51
4.02.02.2.03.0006.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.736.500,00	1.736.000,00	500,00	99,97
4.02.02.2.03.0006.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.03.0006.510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	600.000,00	500.000,00	100.000,00	83,33
4.02.02.2.03.0006.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.698.500,00	14.948.000,00	750.500,00	95,22
4.02.02.2.03.0006.510204	Belanja Perjalanan Dinas	31.065.000,00	30.687.800,00	377.200,00	98,79
4.02.02.2.03.0006.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31.065.000,00	30.687.800,00	377.200,00	98,79
4.02.02.2.03.0006.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.065.000,00	30.687.800,00	377.200,00	98,79
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	223.547.880,00	222.804.113,00	743.767,00	99,67
4.02.02.2.03.0007.51	BELANJA OPERASI	223.547.880,00	222.804.113,00	743.767,00	99,67
4.02.02.2.03.0007.5102	Belanja Barang dan Jasa	223.547.880,00	222.804.113,00	743.767,00	99,67
4.02.02.2.03.0007.510201	Belanja Barang	4.418.880,00	4.322.050,00	96.830,00	97,81
4.02.02.2.03.0007.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.418.880,00	4.322.050,00	96.830,00	97,81
4.02.02.2.03.0007.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.529.000,00	2.518.000,00	11.000,00	99,57
4.02.02.2.03.0007.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.649.880,00	1.604.050,00	45.830,00	97,22
4.02.02.2.03.0007.510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	240.000,00	200.000,00	40.000,00	83,33
4.02.02.2.03.0007.510204	Belanja Perjalanan Dinas	219.129.000,00	218.482.063,00	646.937,00	99,70
4.02.02.2.03.0007.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	219.129.000,00	218.482.063,00	646.937,00	99,70
4.02.02.2.03.0007.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	219.129.000,00	218.482.063,00	646.937,00	99,70
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	260.629.000,00	259.945.424,00	683.576,00	99,74
4.02.02.2.03.0008.51	BELANJA OPERASI	260.629.000,00	259.945.424,00	683.576,00	99,74
4.02.02.2.03.0008.5102	Belanja Barang dan Jasa	260.629.000,00	259.945.424,00	683.576,00	99,74
4.02.02.2.03.0008.510201	Belanja Barang	39.532.000,00	39.126.000,00	406.000,00	98,97
4.02.02.2.03.0008.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	39.532.000,00	39.126.000,00	406.000,00	98,97
4.02.02.2.03.0008.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.777.000,00	6.777.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.03.0008.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
4.02.02.2.03.0008.510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.03.0008.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.395.000,00	31.349.000,00	46.000,00	99,85
4.02.02.2.03.0008.510204	Belanja Perjalanan Dinas	221.097.000,00	220.819.424,00	277.576,00	99,87
4.02.02.2.03.0008.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	221.097.000,00	220.819.424,00	277.576,00	99,87
4.02.02.2.03.0008.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	221.097.000,00	220.819.424,00	277.576,00	99,87





4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.530.839.402,00	2.517.513.263,00	13.326.139,00	99,47
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	344.905.090,00	343.761.171,00	1.143.919,00	99,67
4.02.02.2.04.0001.51	BELANJA OPERASI	344.905.090,00	343.761.171,00	1.143.919,00	99,67
4.02.02.2.04.0001.5102	Belanja Barang dan Jasa	344.905.090,00	343.761.171,00	1.143.919,00	99,67
4.02.02.2.04.0001.510201	Belanja Barang	46.482.090,00	46.482.090,00	0,00	100,00
4.02.02.2.04.0001.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	46.482.090,00	46.482.090,00	0,00	100,00
4.02.02.2.04.0001.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.839.090,00	15.839.090,00	0,00	100,00
4.02.02.2.04.0001.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	549.000,00	549.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.04.0001.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.414.000,00	17.414.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.04.0001.510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.108.000,00	3.108.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.04.0001.510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.830.000,00	8.830.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.04.0001.510201010032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	742.000,00	742.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.04.0001.510202	Belanja Jasa	69.850.000,00	69.850.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.04.0001.51020201	Belanja Jasa Kantor	69.850.000,00	69.850.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.04.0001.510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.04.0001.510202010011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	22.450.000,00	22.450.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.04.0001.510202010055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.04.0001.51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.0001.510202120003	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.0001.510204	Belanja Perjalanan Dinas	228.573.000,00	227.429.081,00	1.143.919,00	99,50
4.02.02.2.04.0001.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	228.573.000,00	227.429.081,00	1.143.919,00	99,50
4.02.02.2.04.0001.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.373.000,00	7.109.081,00	263.919,00	96,42
4.02.02.2.04.0001.510204010005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	221.200.000,00	220.320.000,00	880.000,00	99,60
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	1.574.338.040,00	1.573.492.274,00	845.766,00	99,95
4.02.02.2.04.0002.51	BELANJA OPERASI	1.574.338.040,00	1.573.492.274,00	845.766,00	99,95
4.02.02.2.04.0002.5102	Belanja Barang dan Jasa	1.574.338.040,00	1.573.492.274,00	845.766,00	99,95
4.02.02.2.04.0002.510201	Belanja Barang	13.669.040,00	13.661.880,00	7.160,00	99,95
4.02.02.2.04.0002.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	13.669.040,00	13.661.880,00	7.160,00	99,95
4.02.02.2.04.0002.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.04.0002.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.697.040,00	5.689.880,00	7.160,00	99,87
4.02.02.2.04.0002.510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.012.000,00	3.012.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.04.0002.510202	Belanja Jasa	816.000.000,00	816.000.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.04.0002.51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	816.000.000,00	816.000.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.04.0002.510202120003	Belanja Bimbingan Teknis	816.000.000,00	816.000.000,00	0,00	100,00



Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2024



4.02.02.2.04.0002.510204	Belanja Perjalanan Dinas	744.669.000,00	743.830.394,00	838.606,00	99,89
4.02.02.2.04.0002.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	744.669.000,00	743.830.394,00	838.606,00	99,89
4.02.02.2.04.0002.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	744.669.000,00	743.830.394,00	838.606,00	99,89
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.0004.51	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.0004.5102	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.0004.510202	Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.0004.51020201	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.0004.510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	219.277.152,00	214.171.328,00	5.105.824,00	97,67
4.02.02.2.04.0005.51	BELANJA OPERASI	219.277.152,00	214.171.328,00	5.105.824,00	97,67
4.02.02.2.04.0005.5102	Belanja Barang dan Jasa	219.277.152,00	214.171.328,00	5.105.824,00	97,67
4.02.02.2.04.0005.510201	Belanja Barang	1.465.180,00	1.460.000,00	5.180,00	99,65
4.02.02.2.04.0005.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.465.180,00	1.460.000,00	5.180,00	99,65
4.02.02.2.04.0005.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.2.04.0005.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.465.180,00	1.460.000,00	5.180,00	99,65
4.02.02.2.04.0005.510202	Belanja Jasa	217.811.972,00	212.711.328,00	5.100.644,00	97,66
4.02.02.2.04.0005.51020201	Belanja Jasa Kantor	204.250.000,00	203.400.000,00	850.000,00	99,58
4.02.02.2.04.0005.510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	204.250.000,00	203.400.000,00	850.000,00	99,58
4.02.02.2.04.0005.51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.561.972,00	9.311.328,00	4.250.644,00	68,66
4.02.02.2.04.0005.510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.442.972,00	8.281.008,00	1.161.964,00	87,69
4.02.02.2.04.0005.510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.869.000,00	457.920,00	1.411.080,00	24,50
4.02.02.2.04.0005.510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.250.000,00	572.400,00	1.677.600,00	25,44
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	16.204.000,00	15.026.000,00	1.178.000,00	92,73
4.02.02.2.04.0006.51	BELANJA OPERASI	16.204.000,00	15.026.000,00	1.178.000,00	92,73
4.02.02.2.04.0006.5102	Belanja Barang dan Jasa	16.204.000,00	15.026.000,00	1.178.000,00	92,73
4.02.02.2.04.0006.510201	Belanja Barang	16.204.000,00	15.026.000,00	1.178.000,00	92,73
4.02.02.2.04.0006.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	16.204.000,00	15.026.000,00	1.178.000,00	92,73
4.02.02.2.04.0006.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	1.510.000,00	90.000,00	94,38
4.02.02.2.04.0006.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.586.000,00	2.586.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.04.0006.510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.280.000,00	1.060.000,00	220.000,00	82,81
4.02.02.2.04.0006.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.738.000,00	9.870.000,00	868.000,00	91,92
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	59.999.800,00	58.674.900,00	1.324.900,00	97,79
4.02.02.2.04.0007.51	BELANJA OPERASI	59.999.800,00	58.674.900,00	1.324.900,00	97,79
4.02.02.2.04.0007.5102	Belanja Barang dan Jasa	59.999.800,00	58.674.900,00	1.324.900,00	97,79
4.02.02.2.04.0007.510201	Belanja Barang	8.841.800,00	8.153.000,00	688.800,00	92,21
4.02.02.2.04.0007.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8.841.800,00	8.153.000,00	688.800,00	92,21





Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2024



4.02.02.2.04.0007.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.410.000,00	2.409.500,00	500,00	99,98
4.02.02.2.04.0007.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	231.800,00	213.500,00	18.300,00	92,11
4.02.02.2.04.0007.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.200.000,00	5.530.000,00	670.000,00	89,19
4.02.02.2.04.0007.510204	Belanja Perjalanan Dinas	51.158.000,00	50.521.900,00	636.100,00	98,76
4.02.02.2.04.0007.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	51.158.000,00	50.521.900,00	636.100,00	98,76
4.02.02.2.04.0007.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51.158.000,00	50.521.900,00	636.100,00	98,76
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	316.115.320,00	312.387.590,00	3.727.730,00	98,82
4.02.02.2.04.0008.51	BELANJA OPERASI	316.115.320,00	312.387.590,00	3.727.730,00	98,82
4.02.02.2.04.0008.5102	Belanja Barang dan Jasa	316.115.320,00	312.387.590,00	3.727.730,00	98,82
4.02.02.2.04.0008.510201	Belanja Barang	211.900.320,00	208.231.450,00	3.668.870,00	98,27
4.02.02.2.04.0008.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	211.900.320,00	208.231.450,00	3.668.870,00	98,27
4.02.02.2.04.0008.510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	43.460.000,00	43.199.250,00	260.750,00	99,40
4.02.02.2.04.0008.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.04.0008.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	110.175.320,00	110.092.200,00	83.120,00	99,92
4.02.02.2.04.0008.510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	890.000,00	890.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.04.0008.510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	54.325.000,00	51.000.000,00	3.325.000,00	93,88
4.02.02.2.04.0008.510202	Belanja Jasa	69.250.000,00	69.200.000,00	50.000,00	99,93
4.02.02.2.04.0008.51020201	Belanja Jasa Kantor	69.250.000,00	69.200.000,00	50.000,00	99,93
4.02.02.2.04.0008.510202010055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	69.250.000,00	69.200.000,00	50.000,00	99,93
4.02.02.2.04.0008.510204	Belanja Perjalanan Dinas	34.965.000,00	34.956.140,00	8.860,00	99,97
4.02.02.2.04.0008.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.965.000,00	34.956.140,00	8.860,00	99,97
4.02.02.2.04.0008.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.965.000,00	34.956.140,00	8.860,00	99,97
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.706.656.360,00	1.572.528.912,00	134.127.448,00	92,14
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	460.086.240,00	434.638.956,00	25.447.284,00	94,47
4.02.02.2.05.0001.51	BELANJA OPERASI	460.086.240,00	434.638.956,00	25.447.284,00	94,47
4.02.02.2.05.0001.5102	Belanja Barang dan Jasa	460.086.240,00	434.638.956,00	25.447.284,00	94,47
4.02.02.2.05.0001.510201	Belanja Barang	3.736.240,00	3.421.300,00	314.940,00	91,57
4.02.02.2.05.0001.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.736.240,00	3.421.300,00	314.940,00	91,57
4.02.02.2.05.0001.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.080.000,00	932.000,00	148.000,00	86,30
4.02.02.2.05.0001.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	721.240,00	664.300,00	56.940,00	92,11
4.02.02.2.05.0001.510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	360.000,00	300.000,00	60.000,00	83,33
4.02.02.2.05.0001.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.575.000,00	1.525.000,00	50.000,00	96,83
4.02.02.2.05.0001.510204	Belanja Perjalanan Dinas	456.350.000,00	431.217.656,00	25.132.344,00	94,49
4.02.02.2.05.0001.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	456.350.000,00	431.217.656,00	25.132.344,00	94,49
4.02.02.2.05.0001.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	456.350.000,00	431.217.656,00	25.132.344,00	94,49
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	50.000.000,00	49.299.456,00	700.544,00	98,60





Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2024



4.02.02.2.05.0002.51	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.299.456,00	700.544,00	98,60
4.02.02.2.05.0002.5102	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.299.456,00	700.544,00	98,60
4.02.02.2.05.0002.510201	Belanja Barang	13.805.000,00	13.805.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.05.0002.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	13.805.000,00	13.805.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.05.0002.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.005.000,00	3.005.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.05.0002.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.05.0002.510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.05.0002.510204	Belanja Perjalanan Dinas	36.195.000,00	35.494.456,00	700.544,00	98,06
4.02.02.2.05.0002.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	36.195.000,00	35.494.456,00	700.544,00	98,06
4.02.02.2.05.0002.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36.195.000,00	35.494.456,00	700.544,00	98,06
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	1.196.570.120,00	1.088.590.500,00	107.979.620,00	90,98
4.02.02.2.05.0003.51	BELANJA OPERASI	1.196.570.120,00	1.088.590.500,00	107.979.620,00	90,98
4.02.02.2.05.0003.5102	Belanja Barang dan Jasa	1.196.570.120,00	1.088.590.500,00	107.979.620,00	90,98
4.02.02.2.05.0003.510201	Belanja Barang	852.950.120,00	850.924.700,00	2.025.420,00	99,76
4.02.02.2.05.0003.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	852.950.120,00	850.924.700,00	2.025.420,00	99,76
4.02.02.2.05.0003.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.491.000,00	5.485.000,00	6.000,00	99,89
4.02.02.2.05.0003.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.559.120,00	7.104.700,00	1.454.420,00	83,01
4.02.02.2.05.0003.510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.05.0003.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	835.300.000,00	834.735.000,00	565.000,00	99,93
4.02.02.2.05.0003.510204	Belanja Perjalanan Dinas	343.620.000,00	237.665.800,00	105.954.200,00	69,17
4.02.02.2.05.0003.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	343.620.000,00	237.665.800,00	105.954.200,00	69,17
4.02.02.2.05.0003.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	343.620.000,00	237.665.800,00	105.954.200,00	69,17
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	79.999.800,00	77.032.014,00	2.967.786,00	96,29
4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	29.999.960,00	27.654.550,00	2.345.410,00	92,18
4.02.02.2.06.0001.51	BELANJA OPERASI	29.999.960,00	27.654.550,00	2.345.410,00	92,18
4.02.02.2.06.0001.5102	Belanja Barang dan Jasa	29.999.960,00	27.654.550,00	2.345.410,00	92,18
4.02.02.2.06.0001.510201	Belanja Barang	4.009.960,00	3.750.850,00	259.110,00	93,54
4.02.02.2.06.0001.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.009.960,00	3.750.850,00	259.110,00	93,54
4.02.02.2.06.0001.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	336.200,00	260.500,00	75.700,00	77,48
4.02.02.2.06.0001.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	698.760,00	679.350,00	19.410,00	97,22
4.02.02.2.06.0001.510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	360.000,00	300.000,00	60.000,00	83,33
4.02.02.2.06.0001.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.615.000,00	2.511.000,00	104.000,00	96,02
4.02.02.2.06.0001.510204	Belanja Perjalanan Dinas	25.990.000,00	23.903.700,00	2.086.300,00	91,97
4.02.02.2.06.0001.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.990.000,00	23.903.700,00	2.086.300,00	91,97
4.02.02.2.06.0001.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.990.000,00	23.903.700,00	2.086.300,00	91,97
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	49.999.840,00	49.377.464,00	622.376,00	98,76





Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2024



4.02.02.2.06.0002.51	BELANJA OPERASI	49.999.840,00	49.377.464,00	622.376,00	98,76
4.02.02.2.06.0002.5102	Belanja Barang dan Jasa	49.999.840,00	49.377.464,00	622.376,00	98,76
4.02.02.2.06.0002.510201	Belanja Barang	3.727.840,00	3.421.150,00	306.690,00	91,77
4.02.02.2.06.0002.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.727.840,00	3.421.150,00	306.690,00	91,77
4.02.02.2.06.0002.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.132.000,00	924.000,00	208.000,00	81,63
4.02.02.2.06.0002.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	420.840,00	409.150,00	11.690,00	97,22
4.02.02.2.06.0002.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.175.000,00	2.088.000,00	87.000,00	96,00
4.02.02.2.06.0002.510204	Belanja Perjalanan Dinas	46.272.000,00	45.956.314,00	315.686,00	99,32
4.02.02.2.06.0002.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.272.000,00	45.956.314,00	315.686,00	99,32
4.02.02.2.06.0002.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46.272.000,00	45.956.314,00	315.686,00	99,32
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	67.689.960,00	62.851.350,00	4.838.610,00	92,85
4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	67.689.960,00	62.851.350,00	4.838.610,00	92,85
4.02.02.2.07.0002.51	BELANJA OPERASI	67.689.960,00	62.851.350,00	4.838.610,00	92,85
4.02.02.2.07.0002.5102	Belanja Barang dan Jasa	67.689.960,00	62.851.350,00	4.838.610,00	92,85
4.02.02.2.07.0002.510201	Belanja Barang	26.819.960,00	26.251.350,00	568.610,00	97,88
4.02.02.2.07.0002.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	26.819.960,00	26.251.350,00	568.610,00	97,88
4.02.02.2.07.0002.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.07.0002.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	22.569.960,00	22.001.350,00	568.610,00	97,48
4.02.02.2.07.0002.510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.07.0002.510203	Belanja Pemeliharaan	40.870.000,00	36.600.000,00	4.270.000,00	89,55
4.02.02.2.07.0002.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.870.000,00	36.600.000,00	4.270.000,00	89,55
4.02.02.2.07.0002.510203020148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	40.870.000,00	36.600.000,00	4.270.000,00	89,55
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	1.184.640.080,00	1.182.324.739,00	2.315.341,00	99,80
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	950.132.080,00	949.214.666,00	917.414,00	99,90
4.02.02.2.08.0001.51	BELANJA OPERASI	950.132.080,00	949.214.666,00	917.414,00	99,90
4.02.02.2.08.0001.5102	Belanja Barang dan Jasa	950.132.080,00	949.214.666,00	917.414,00	99,90
4.02.02.2.08.0001.510201	Belanja Barang	33.468.080,00	33.368.080,00	100.000,00	99,70
4.02.02.2.08.0001.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	33.468.080,00	33.368.080,00	100.000,00	99,70
4.02.02.2.08.0001.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.920.000,00	3.870.000,00	50.000,00	98,72
4.02.02.2.08.0001.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.618.080,00	15.568.080,00	50.000,00	99,68
4.02.02.2.08.0001.510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.08.0001.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	100,00
4.02.02.2.08.0001.510204	Belanja Perjalanan Dinas	916.664.000,00	915.846.586,00	817.414,00	99,91
4.02.02.2.08.0001.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	916.664.000,00	915.846.586,00	817.414,00	99,91
4.02.02.2.08.0001.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	916.664.000,00	915.846.586,00	817.414,00	99,91





4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	174.508.000,00	173.120.073,00	1.387.927,00	99,20
4.02.02.2.08.0003.51	BELANJA OPERASI	174.508.000,00	173.120.073,00	1.387.927,00	99,20
4.02.02.2.08.0003.5102	Belanja Barang dan Jasa	174.508.000,00	173.120.073,00	1.387.927,00	99,20
4.02.02.2.08.0003.510201	Belanja Barang	11.508.000,00	10.280.000,00	1.228.000,00	89,33
4.02.02.2.08.0003.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	11.508.000,00	10.280.000,00	1.228.000,00	89,33
4.02.02.2.08.0003.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.268.000,00	2.892.000,00	376.000,00	88,49
4.02.02.2.08.0003.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.520.000,00	1.400.000,00	120.000,00	92,11
4.02.02.2.08.0003.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.720.000,00	5.988.000,00	732.000,00	89,11
4.02.02.2.08.0003.510204	Belanja Perjalanan Dinas	163.000.000,00	162.840.073,00	159.927,00	99,90
4.02.02.2.08.0003.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	163.000.000,00	162.840.073,00	159.927,00	99,90
4.02.02.2.08.0003.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	163.000.000,00	162.840.073,00	159.927,00	99,90
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	60.000.000,00	59.990.000,00	10.000,00	99,98
4.02.02.2.08.0004.51	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	59.990.000,00	10.000,00	99,98
4.02.02.2.08.0004.5102	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.990.000,00	10.000,00	99,98
4.02.02.2.08.0004.510201	Belanja Barang	60.000.000,00	59.990.000,00	10.000,00	99,98
4.02.02.2.08.0004.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	60.000.000,00	59.990.000,00	10.000,00	99,98
4.02.02.2.08.0004.510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	60.000.000,00	59.990.000,00	10.000,00	99,98
Total		34.163.802.010,00	33.523.514.714,00	640.287.296,00	98,13

3.5 Hambatan dan Kendala

Secara umum dalam pencapaian target realisasi pendapatan dan belanja yang tidak optimal dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala permasalahan secara umum yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (RKAP, DPAP) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.



- b. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
- c. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya gedung arsip, belum adanya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara dan banyaknya peralatan perkantoran yang rusak.
- d. Koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi dalam dan luar daerah masih kurang optimal.

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.



4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 adalah basis akrual. dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang menyajikan saldo Akun-Akun tahun 2024 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.



4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2024 adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran serta untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

4.4 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA merupakan semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan

Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) No. 02 menyatakan bahwa pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya. Dengan demikian, pernyataan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada RKUD sebagaimana paragraph 21 PSAP No. 02



Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan paragraf 22 PSAP No. 02

Lampiran II PP No.71 Tahun 2010 perlu diinterpretasikan, sehingga Pendapatan-LRA sesuai PSAP di atas mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.



Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif:

1. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.
2. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak.
3. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
4. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama



beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima pemerintah daerah.

5. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh Pemerintah Daerah.

Pengukuran

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu





dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pengakuan

Pendapatan-LO dapat diakui dengan kriteria:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan
 - 1) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
 - 2) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan



Pendapatan dari dana transfer diakui sebagai berikut:

- a) Dana Bagi Hasil diakui berdasarkan realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah atau surat dari Pemerintah Pusat yang menyatakan kekurangan penyaluran dana bagi hasil.
- b) Dana Alokasi Umum diakui berdasarkan Peraturan Presiden yang mengatur tentang dana transfer dan dicatat pada tahun yang berkenaan.
- c) Dana Alokasi Khusus diakui pada saat terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya. Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal pengakuan pendapatan dan direalisasinya pendapatan dalam bentuk kas, pendapatan dapat diakui pada saat realisasi.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternative:

1. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan.



2. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak.

Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.

3. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui.
4. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap



nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

5. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO pada saat pembayaran telah diterima oleh Pemerintah Daerah.

Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.



Pengakuan

Sesuai dengan Paragraf 31 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 31 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 dan telah diinterpretasikan sesuai IPSAP 02, pengakuan Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Oleh karena itu, Belanja diakui pada saat:

- a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
- b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Kas yang dikeluarkan untuk belanja yang digunakan langsung oleh satker/SKPD, dimana pendapatan yang digunakan untuk pengeluaran Belanja tersebut tidak disetor ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.



Pengukuran

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

- a. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- b. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- c. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.7 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Beban diklasifikasi menurut:



Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Berdasarkan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional (LO), beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Berikut adalah klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban tersebut:

Pengakuan

Beban dapat diakui dengan kriteria:

a. Saat timbulnya kewajiban

adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

b. Saat terjadinya konsumsi aset

adalah saat pengeluaran kas atau timbulnya kewajiban kepada pihak lain (pencatatan pembelian persediaan dengan metode periodik) dan/atau



konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (dengan metode perpetual).

c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

adalah saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diakui pada saat diterimanya Bukti pengeluaran/kwitansi/ sejenisnya untuk pengeluaran yang menggunakan mekanisme UP/GU/TU, sedangkan untuk pengeluaran yang menggunakan mekanisme LS dengan menggunakan dokumen tagihan seperti Berita Acara Serah Terima 100 % atau dokumen serah terima lainnya yang sejenis

Beban dibayar dimuka

Apabila terjadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas daerah, maka kebijakan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar diMuka (akun neraca).



Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

- a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.8 Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer merupakan pengeluaran uang dari provinsi kepada kabupaten/kota atau dari kabupaten/kota kepada desa, yaitu Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi.

Transfer terdiri dari:

a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Transfer Bagi Hasil Pendapatan merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dari suatu pemerintah daerah ke pemerintahan daerah yang lebih rendah.

b. Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah



daerah lainnya yang digunakan untuk pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus termasuk bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pengakuan

Transfer diakui pada saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengukuran

Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.9 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

a. Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman,



penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada Pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

b. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengakuan

Sesuai Paragraf 52 PSAP 02 Lamp. I & Paragraf 52 PSAP Lamp. II PP 71/2010, penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Berdasarkan IPSAP Nomor 03 Tahun 2010, Penerimaan Pembiayaan mencakup transaksi berikut :

- a. penerimaan pembiayaan yang diterima pada RKUN/RKUD;
- b. penerimaan pembiayaan pada rekening khusus, yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang;
- c. pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah BUN/BUD untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan sebagai pembiayaan.



Adapun sesuai Paragraf 56 PSAP 02 Lamp. I dan Paragraf 56 PSAP 02 Lamp. II PP 71/ 2010, Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Sesuai dengan IPSAP Nomor 03 Tahun 2010, Pengeluaran Pembiayaan mencakup transaksi berikut:

- pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari RKUD;
- pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUD yang diakui oleh BUD.

Pengukuran

Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)..

4.10 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah serta investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas meliputi seluruh Uang Persediaan (Sisa UP/TU), saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan



pembayaran, uang tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke Kas Daerah, maupun uang tunai atau simpanan di bank yang digunakan

4.11 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. (PSAP 06 paragraf 6 dan 10).

Dengan memperhatikan kriteria pada definisi tersebut, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi pemerintah daerah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga, tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:

- a) Surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
- b) Surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah daerah; atau



- c) Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Investasi yang termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan dan Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) sampai 12 bulan;
- b) Surat Utang Negara (SUN); dan
- c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Pengukuran

- Deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- Surat Utang Negara (SUN) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.
- Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.



Pengakuan

Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/ mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.

Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan (Pendapatan Asli Daerah).



4.12 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Sesuai dengan PMK No.238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) pada bagan akun standar, piutang dibagi menjadi:

a) Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan dapat terbagi berdasarkan peristiwa yang mendasari sesuai dengan Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang - PP No. 24 Tahun 2005, yang dibedakan menjadi:

- Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/ pungutan pendapatan daerah.

Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/ pungutan pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain berdasarkan Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, serta peraturan daerah yang berlaku di pemerintah daerah yang meliputi



Piutang Lain-lain PAD yang Sah. (Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang- PP No. 24 Tahun 2005).

- Piutang berdasarkan perikatan perjanjian

Piutang berdasarkan perikatan perjanjian adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian meliputi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Bantuan Keuangan, Piutang Hibah, dan Piutang Pendapatan Lainnya. (Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang - PP No. 24 Tahun 2005).

Piutang Lainnya

Sesuai dengan Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang, Piutang Lainnya berdasarkan peristiwa yang mendasari dapat dibedakan menjadi :

- Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi

Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang di



sebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah seperti Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

➤ Piutang berdasarkan peristiwa lainnya

Piutang berdasarkan peristiwa lainnya, adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena peristiwa lainnya selain empat peristiwa di atas. Piutang ini meliputi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Uang Muka Belanja, Beban dibayar Dimuka dan Uang Muka yang Harus Dipertanggungjawabkan.

4.13 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran. Pencatatan persediaan.

- ❖ Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang menerapkan perhitungan Persediaan secara **periodik** berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi



persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, benda berharga, dan yang sejenis.

- ❖ Pengukuran nilai persediaan itu sendiri dilakukan dengan menggunakan Harga Pembelian Terakhir (nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali)

4.14 Kebijakan Akuntansi Aset Non Lancar

Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

- a) barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;
- b) bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;



- d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

Pengukuran

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran. Pencatatan persediaan.

- Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang menerapkan perhitungan Persediaan secara **periodik** berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, benda berharga, dan yang sejenis.
- Pengukuran nilai persediaan itu sendiri dilakukan dengan menggunakan



Harga Pembelian Terakhir (nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali)

4.15 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yaitu :

- a) Tanah
- b) Peralatan dan Mesin
- c) Gedung dan Bangunan
- d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- e) Aset Tetap Lainnya
- f) Konstruksi dalam Pengerjaan

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) berwujud;



- b) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah, saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Yang dimaksudkan dengan biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun.

Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset



tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

4.16 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kebijakan akuntansi kewajiban akan mengatur hal-hal yang terkait dengan kewajiban. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena:

- a. penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
- b. perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah;
- c. kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan
- d. kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

4.17 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih



antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit-LRA

Ekuitas untuk Dikonsolidasikandigunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

Pengakuan

Pengakuan atas ekuitas tergantung dari saat pengakuan aset dan kewajiban.

Pengukuran

Pengukuran atas ekuitas tergantung dari pengukuran atas aset dan kewajiban.



V. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Penjelasan masing-masing Akun LRA sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan - LRA

Jumlah anggaran Pendapatan Tahun 2024 sebesar Nihil. sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2024; Tidak ada anggaran dan realisasi Pendapatan selama Tahun 2024.

5.1.2 Belanja

Pada Tahun 2024, realisasi Belanja Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah mencapai sebesar **Rp 33.523.514.714,00** atau terdapat sisa anggaran sebesar **Rp 640.287.296,00** dari anggaran sebesar **Rp 34.163.802.010,00** yang dengan rincian sebagai berikut:



LAPORAN OPERASIONAL

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tahun Anggaran 2024

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	%
1	PENDAPATAN	65.806.250,00	0,00	65.806.250,00	0,00
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	65.806.250,00	0,00	65.806.250,00	0,00
3	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pajak Air Permukaan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pajak Rokok-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pajak Hotel-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pajak Restoran-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pajak Hiburan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Pajak Reklame-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Pajak Penerangan Jalan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Pajak Parkir-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Pajak Air Tanah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Pajak Sarang Burung Walet-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Retribusi Jasa Umum-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Retribusi Jasa Usaha-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00



NO	URAIAN	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	%
25	Bagian Laba yang Dibagikan kepadaPemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas PenyertaanModal pada BUMD-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Lain-lain PAD yang Sah	65.806.250,00	0,00	65.806.250,00	0,00
28	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	65.806.250,00	0,00	65.806.250,00	0,00
30	Hasil Pemanfaatan BMD yang TidakDipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jasa Giro-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Pendapatan Bunga-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Penerimaan atas Tuntutan Ganti KerugianKeuangan Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Penerimaan Komisi, Potongan, atau BentukLain-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Pendapatan dari Pengembalian-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Pendapatan dari BLUD-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yangTidak Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas	0,00	0,00	0,00	0,00



NO	URAIAN	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	%
	KesehatanTingkat Pertama (FKTP)-LO				
46	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan(Inkracht)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Pendapatan Zakat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	65.806.250,00	0,00	65.806.250,00	0,00
51					
52	PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
53	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Dana Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Dana Alokasi Khusus-Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Dana Alokasi Khusus-non Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
59					
60	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Jumlah Pendapatan Pemerintah Pusat Transfer - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
66					
67	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Pendapatan Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Total Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
72					



NO	URAIAN	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	%
73	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Lain-lain Pendapatan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
86	JUMLAH PENDAPATAN	65.806.250,00	0,00	65.806.250,00	0,00
87					
88	BEBAN	33.932.123.839,30	32.545.213.644,53	1.386.910.194,77	104,26
89	BEBAN OPERASI	33.473.814.714,00	31.987.375.963,00	1.486.438.751,00	104,65
90	Beban Pegawai	17.673.897.293,00	17.797.273.903,00	(123.376.610,00)	99,31
91	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.085.485.680,00	1.906.341.407,00	179.144.273,00	109,40
92	Beban Tambahan Penghasilan ASN	762.260.084,00	912.627.476,00	(150.367.392,00)	83,52
93	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	196.936.000,00	209.667.600,00	(12.731.600,00)	93,93
94	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	14.461.215.529,00	14.567.037.420,00	(105.821.891,00)	99,27
95	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRDserta KDH/WKDH	168.000.000,00	201.600.000,00	(33.600.000,00)	83,33
97	Beban Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00



NO	URAIAN	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	%
98	Beban Barang dan Jasa	15.799.917.421,00	14.190.102.060,00	1.609.815.361,00	111,34
99	Beban Barang	4.439.908.896,00	4.762.235.369,00	(322.326.473,00)	93,23
100	Beban Jasa	2.271.333.585,00	2.297.673.369,00	(26.339.784,00)	98,85
101	Beban Pemeliharaan	119.420.000,00	169.653.188,00	(50.233.188,00)	70,39
102	Beban Perjalanan Dinas	8.969.254.940,00	6.960.540.134,00	2.008.714.806,00	128,86
103	Beban Barang untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Beban Bunga Utang Pinjaman BLUD-Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Beban Subsidi kepada BUMN	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Beban Subsidi kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Beban Hibah kepada BUMN	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Beban Hibah Uang kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang	0,00	0,00	0,00	0,00



NO	URAIAN	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	%
	BerbadanHukum Indonesia				
123	Beban Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan,Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Beban Penyisihan Piutang Lain- Lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Jumlah Beban Operasi	33.473.814.714,00	31.987.375.963,00	1.486.438.751,00	104,65
136					
137	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	458.309.125,30	557.837.681,53	(99.528.556,23)	82,16
138	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	293.936.038,25	393.464.594,49	(99.528.556,24)	74,70
139	Beban Penyusutan Alat Besar	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Beban Penyusutan Alat Angkutan	129.879.406,25	180.395.062,49	(50.515.656,24)	72,00
141	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
142	Beban Penyusutan Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	103.582.632,00	110.546.232,00	(6.963.600,00)	93,70
144	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.874.000,00	4.332.800,00	(1.458.800,00)	66,33
145	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00



NO	URAIAN	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	%
146	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Beban Penyusutan Komputer	57.000.000,00	97.590.500,00	(40.590.500,00)	58,41
148	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Beban Penyusutan Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Beban Penyusutan Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	146.702.572,05	146.702.572,04	0,01	100,00
158	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	146.702.572,05	146.702.572,04	0,01	100,00
159	Beban Penyusutan Monumen	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Beban Penyusutan Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.690.515,00	7.690.515,00	0,00	100,00
163	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Beban Penyusutan Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Beban Penyusutan Instalasi	618.800,00	618.800,00	0,00	100,00
166	Beban Penyusutan Jaringan	7.071.715,00	7.071.715,00	0,00	100,00
167	Beban Penyusutan Aset tetap lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00



NO	URAIAN	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	%
170	Beban Penyusutan Aset lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	9.980.000,00	9.980.000,00	0,00	100,00
173	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	9.980.000,00	9.980.000,00	0,00	100,00
174	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
175	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
176	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
178	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
179	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Konsesi Jasa Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Disediakan Pemberi Konsesi-Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang Bersumber dari Milik Mitra	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Beban Penyusutan Properti Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00
183	Beban Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
184	Jumlah Beban Penyusutan Dan Amortisasi	458.309.125,30	557.837.681,53	(99.528.556,23)	82,16
185					
186	BEBAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
187	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
188	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00



Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2024



NO	URAIAN	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	%
191	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
194	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
195	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
196	Jumlah Beban Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
197					
198	BEBAN TAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
199	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Jumlah Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
202	JUMLAH BEBAN	33.932.123.839,30	32.545.213.644,53	1.386.910.194,77	104,26
203					
204	SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI	(33.866.317.589,30)	(32.545.213.644,53)	(1.321.103.944,77)	104,06
205					
206	SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207	SURPLUS NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Surplus Penjualan BMD yang TidakDipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Surplus Pertukaran BMD yang TidakDipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Surplus Penyelesaian Utang kepada PemerintahPusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00



NO	URAIAN	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	%
215	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
219	Jumlah Surplus Non Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
220					
221	DEFISIT NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Defisit Tukar Menukar BMD yang TidakDipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
226	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
227	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
228	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Jumlah Defisit Non Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
233	JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
234					
235	SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(33.866.317.589,30)	(32.545.213.644,53)	(1.321.103.944,77)	104,06
236					



NO	URAIAN	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	%
237	POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
238	PENDAPATAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
239	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Jumlah Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
241					
242	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
243	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Jumlah Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
245	JUMLAH POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
246					
247	SURPLUS/ DEFISIT - LO	(33.866.317.589,30)	(32.545.213.644,53)	(1.321.103.944,77)	0,00

4.1.2. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran, yang terdiri dari:

- 1. Penerimaan Pembiayaan Daerah;
- 2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

4.1.2.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

4.1.2.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

4.1.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran



Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp 640.287.296,00** merupakan selisih lebih antara surplus dan defisit dengan pembiayaan netto. SiLPA ini terdiri dari:

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Rincian SILPA

Tahun Anggaran 2024

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
SURPLUS/(DEFISIT)	34.163.802.010,00	33.523.514.714,00	98,10 %	32.138.151.576,00
SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN (SILPA)	34.163.802.010,00	33.523.514.714,00	98,10 %	32.138.151.576,00



5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Tidak terdapat pembandingan LPSAL per 31 Desember 2024 dengan LPSAL tahun sebelumnya.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

5.2.5 Lain-lain

5.3 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2024.

5.3.1 Pendapatan - LO

Tidak ada Pendapatan - LO Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO

5.3.1.2 Pendapatan Transfer – LO



5.3.1.3 Lain Lain Pendapatan yang Sah- LO

5.3.2 Beban Daerah

Jumlah Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar **Rp 33.523.514.714,00**

5.3.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang adalah Beban Operasi untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar **Rp 33.523.514.714,00** dengan rincian sebagai berikut:

a. Beban Hibah

Nihil

b. Beban Bantuan Sosial

Nihil

5.3.2.2 Beban Transfer

5.3.3 Surplus Defisit Non Operasional

5.3.3.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar

5.3.3.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

5.3.3.3 Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya

5.3.3.4 Defisit Penjualan Aset Non Lancar



5.3.3.5 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

5.3.3.6 Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya

5.3.4 Pos Luar Biasa

5.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal sebesar **Rp 8.052.152.462,21** merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana tahun 2024 sebagai berikut:

1. Ekuitas Dana Lancar sebesar	Rp	8.052.152.462,21
2. Ekuitas Dana Investasi sebesar	Rp	0,00
3. Ekuitas Dana Cadangan sebesar	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah		Rp. 8.052.152.462,21



5.4.2 Penambahan/Pengurangan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan.

5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Koreksi Nilai Persediaan
- b. Selisih Revaluasi Aset Tetap
- c. Pengakuan atas Penyisihan Piutang
- d. Pengakuan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan Tahun 2024 sebesar **Rp (9.747.221.449,09)** dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah

Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Uraian	Jumlah
1.	Peralatan dan Mesin	(7.412.012.387,75)
2.	Tanah	0,00
3.	Gedung dan Bangunan	(2.228.863.656,34)



4.	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(83.870.405,00)
5.	Aset Tetap Lainnya	(22.475.000,00)
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
7.	Akumulasi Penyusutan	(9.747.221.449,09)
	Jumlah	(9.747.221.449,09)

e. Pengakuan Akumulasi Amortisasi atas Aset Tak Berwujud sampai dengan Tahun 2024

f. Koreksi Lainnya

5.5 Penjelasan Akun-Akun Neraca

Dalam penjelasan Akun-Akun neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut:

5.5.1.1 Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2024 sebesar **Rp 0.00** disajikan sebagai berikut:



Rincian Aset Lancar

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan / (Penurunan)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0,00	0,00
Persediaan	0.00	0.00	0,00
Jumlah	0.00	0.00	0,00

5.5.1.1.1 Kas di Kas Daerah

5.5.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Per tanggal 31 Desember 2024 tidak terdapat Kas di Bendahara Penerimaan.

5.5.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar **Rp 0,00** dengan rincian sebagai berikut:



Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
per 31 Desember 2024

No	SKPD	Nilai	Tanggal Penyetoran ke Kas Daerah/ Kas Negara
A	Sisa UYHD (UP/ GU/ TU)	0,00	
	Pendapatan yang Ditangguhkan	0,00	
	Sub Jumlah A	0,00	
B	Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	
	Sub Jumlah B	0,00	
	Jumlah (A+B)	0,00	

- 5.5.1.1.4 Kas Lainnya
- 5.5.1.1.5 Setara Kas
- 5.5.1.1.6 Investasi Jangka Pendek
- 5.5.1.1.7 Piutang
- 5.5.1.1.8 Beban di Bayar Dimuka



5.5.1.1.9 Piutang Lainnya

5.5.1.1.10 Persediaan

Nihil

5.5.1.2 Investasi Jangka Panjang

5.5.1.2.1 Investasi Non Permanen

5.5.1.2.2 Investasi Permanen

5.5.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar **Rp 7.678.221.587,91** dengan rincian sebagai berikut:



Tabel Aset Tetap

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Nilai Buku Aset Tetap

Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024		
		Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	7.952.021.321,00	(7.412.012.387,75)	500.248.933,21
2.	Tanah	311.025.000,00	0,00	0,00
3.	Gedung dan Bangunan	8.766.321.010,00	(2.249.183.656,34)	6.517.136.442,81
4.	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	263.510.600,00	(83.870.405,00)	179.640.195,00
5.	Aset Tetap Lainnya	132.565.106,00	(22.475.000,00)	0,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	17.425.443.037,00	(9.747.221.449,09)	7.197.025.571,02

Nilai mutasi aset tetap per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:



Rincian Mutasi Aset Tetap

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

No	Uraian	Per 1 Januari 2024	Mutasi		Per 31 Desember 2024
			bertambah	berkurang	
1.	Tanah	311.025.000,00	0,00	0,00	311.025.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	7.357.871.321,00	576.150.000,00	0,00	7.951.021.321,00
3.	Gedung dan Bangunan	8.766.321.010,00	0,00	0,00	8.766.321.010,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	263.510.600,00	0,00	0,00	263.510.600,00
5.	Aset Tetap Lainnya	132.565.106,00	0,00	0,00	132.565.106,00
	Jumlah	7.678.221.587,917,00	0,00	0,00	7.678.221.587,917,00

Per 31 Desember 2024



5.5.1.3.1 Tanah

5.5.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Tahun 2024 sebesar
Rp 7.952.021.321,00 dengan rincian sebagai berikut:

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Saldo Peralatan dan Mesin

Per 31 Desember 2024

I	Saldo Per 31 Desember 2024		8.626.842.585,30
II	KOREKSI SALDO AWAL 1 JANUARI 2024		8.626.842.585,30
III	MUTASI BERTAMBAH		
	1	Belanja Modal Tahun 2023	0,00
		JUMLAH MUTASI BERTAMBAH	576.150.000,00
IV	MUTASI BERKURANG		
	1	Akumulasi Penyusutan	0,00
		JUMLAH MUTASI BERLURANG	0,00
V	SALDO PER 31 DESEMBER 2022		8.626.842.585,30



5.5.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Tahun 2024 sebesar **Rp 8.766.321.010,00** dengan rincian sebagai berikut:

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Saldo Gedung dan Bangunan

Per 31 Desember 2024

I	Saldo Per 31 Desember 2024	8.766.321.010,00
II	KOREKSI SALDO AWAL 1 JANUARI 2023	8.766.321.010,00
III	MUTASI TAMBAH	
1	Belanja Modal Tahun 2023	0,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	0,00
IV	MUTASI BERKURANG	
1	Akumulasi Penyusutan	0,00
	JUMLAH MUTASI KURANG	0,00
V	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	8.766.321.010,00

5.5.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Tahun 2024 sebesar **Rp 263.510.600,00** dengan rincian sebagai berikut:

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi

Per 31 Desember 2024

I	Saldo Per 31 Desember 2024		263.510.600,00
II	KOREKSI SALDO AWAL 1 JANUARI 2024		0,00
III	MUTASI TAMBAH		
	1	Belanja Modal Tahun 2023	0,00
		JUMLAH MUTASI TAMBAH	0,00
IV	MUTASI KURANG		
	1	Akumulasi Penyusutan	0,00
		JUMLAH MUTASI KURANG	0.00
V	SALDO PER 31 DESEMBER 2024		263.510.600,00



5.5.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2024 sebesar **Rp 132.565.106,00** merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku.

Rincian Aset Tetap Lainnya yang disajikan adalah :

Saldo Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2024

I	Saldo Per 31 Desember 2023	132.565.106,00
II	KOREKSI SALDO AWAL 1 JANUARI 2023	0,00
III	MUTASI TAMBAH	
	1 Belanja Modal Tahun 2023	0,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	0,00
IV	MUTASI KURANG	(22.475.000,00)
	1 Akumulasi Penyusutan	0,00
	JUMLAH MUTASI KURANG	0,00
V	SALDO PER 31 DESEMBER 2024	132.565.106,00



5.5.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

5.5.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan tahun 2024 sebesar Rp 9.747.221.449,09 Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2024

No	Uraian	1 Januari 2024	Mutasi 2024		31 Desember 2024
			Tambah	Kurang	
1	Peralatan dan Mesin	(6.657.432.599,50)	576.150.000,00	0,00	(7.412.012.387,75)
2	Gedung dan Bangunan	(2.082.161.084,29)	0,00	0,00	(2.228.863.656,34)
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	(76.179.890,00)	0,00	0,00	(76.179.890,00)
4	Aset tetap Lainnya	(22.475.000,00)	0,00	0,00	(22.475.000,00)

5.4.1.4 Aset Lainnya

5.4.1.4.1 Tagihan Penjualan Angsuran

5.4.1.4.2 Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

5.4.1.4.3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

5.4.1.4.4 Aset Tidak Berwujud

5.4.1.4.5 Aset Lain-Lain



5.5.2 Kewajiban

Akun kewajiban per 31 Desember 2024 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek.

5.5.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2024 sebesar **Rp 8.426.801,00**

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	Ket
			Tambah	Kurang		
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	8.426.801,00			8.426.801,00	
2	Utang Bunga					
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang					
4	Pendapatan Diterima Dimuka					
5	Utang Beban	0,00			0,00	
6	Utang Jangka Pendek Lainnya					
	Jumlah	8.426.801,00			8.426.801,00	

5.5.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar **Rp 0,00** merupakan utang Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:



Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Per 31 Desember 2024

No	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	Ket
			Tambah	Kurang		
1.	PPh Pasal 21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	PPh Pasal 22	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	PPh Pasal 23	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	PPn	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	

5.5.2.1.2 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

5.5.2.1.3 Utang Beban

5.5.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

5.5.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

5.6 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2024 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non anggaran.



5.6.1 Aktivitas Operasi

5.6.2 Aktivitas Investasi

5.6.3 Aktivitas Pendanaan

5.6.4 Aktivitas Transitoris

VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Penjelasan informasi-informasi non keuangan menyajikan informasi tambahan yang dipandang perlu diketahui oleh stakeholders terutama untuk mencegah kesalahan inteprestasi atas laporan keuangan.

6.1 Penggantian Manajemen Selama tahun Berjalan

Menjelaskan apabila selama Tahun 2024 terdapat pergantian pimpinan (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah/ Kepala SKPD/ pejabat lainnya) yang mempengaruhi yang mempengaruhi kelangsungan pemda kebijakan pemerintah daerah terutama terkait dengan pengungkapan/ penyajian atas laporan keuangan secara signifikan/material>

6.2 Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi manajemen baru

Menjelaskan apabila selama Tahun 2024 terdapat koreksi-koreksi dari manajemen baru atas kesalahan manajemen yang lama yang mempengaruhi kelangsungan



pemda kebijakan pemerintah daerah terutama terkait dengan pengungkapan/ penyajian atas laporan keuangan secara signifikan/material.

6.3 Komitmen dan kontinjensi

Menjelaskan apabila selama Tahun 2024 munculnya komitmen yang berupa perikatan yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak yang harus dilaksanakan apabila kesepakatan/persyaratan antara bersama kedua belah pihak telah terpenuhi (antara pinjaman, transaksi valuta asing) dan kontinjensi yang merupakan kewajiban bersyarat yang dapat terjadi akibat peristiwa di masa yang akan datang yang memiliki tingkat keterjadian tinggi (contoh tuntutan hukum) yang dapat mempengaruhi kelangsungan pemda kebijakan pemerintah daerah terutama terkait dengan pengungkapan/ penyajian atas laporan keuangan secara signifikan/material

6.4 Penggabungan atau pemekaran entitas akuntansi pada tahun berjalan

Menjelaskan apabila selama Tahun 2024 terdapat Penggabungan atau pemekaran entitas akuntansi (SKPD) pada tahun yang mempengaruhi kelangsungan pemda kebijakan pemerintah daerah terutama terkait dengan pengungkapan/ penyajian atas laporan keuangan secara signifikan/material



6.5 Kejadian yang berdampak sosial

Menjelaskan apabila selama Tahun 2024 terdapat kejadian-kejadian yang mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, politik yang mempengaruhi kelangsungan pemda, kebijakan pemerintah daerah terutama terkait dengan pengungkapan/ penyajian atas laporan keuangan secara signifikan/material

6.6 Pengungkapan Lainnya

Hal-hal lain yang perlu kami ungkapkan juga adalah sebagai berikut:

6.6.1 Domisili

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang secara geografis, geoekonomi, dan geopolitik terletak pada 0033'00" Lintang Utara sampai 1030'00" Lintang Utara dan 108039'00" Bujur Timur sampai 110010'00" Bujur Timur.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823).

Sedangkan secara administratif, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang mempunyai batas-batas wilayah, sebagai berikut.



- a. Sebelah Utara : Serawak Malaysia Timur, Kabupaten Sambas
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Sanggau, Kabupaten Landak
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Mempawah
- d. Sebelah Barat : Laut Natuna, Pemkot Singkawang

6.6.2 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- b. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024;
- c. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024.



VII PENUTUP

Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (stakeholder) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan.

Bengkayang, 31 Januari 2024

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BENGKAYANG,



BERNADETA S.H. M.H.

Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19710416 200003 2 005



PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Akrual Basis.

Bengkayang, 31 Januari 2024

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BENGKAYANG,



BERNADETA S.H, M.H.

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19710416 200003 2 005